



L K I P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



bnn

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Palapa No.1A Oebobo Kota Kupang
email: bnnpntt@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024** dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas Pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

Pada Tahun Anggaran 2024, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Wilayah, telah melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam implementasi program dan kegiatan mengacu pada rencana strategis lembaga dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sebagai gambaran bahwa capaian sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja, ada yang telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan, di sisi lain, masih terdapat target kinerja yang belum tercapai secara optimal. Keberhasilan dan belum optimalnya pencapaian target dimaksud akan dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Selain itu, rekomendasi yang akan dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan P4GN dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan

laporan maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua, Amin.

Kupang, 22 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Totok Lisdiarto S, S.I.K., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. GAMBARAN UMUM.....	15
B. DASAR HUKUM.....	16
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA.....	21
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	23
C. PERJANJIAN KINERJA.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. ANALISI CAPAIN KINERJA.....	28
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	115
BAB IV PENUTUP.....	121
LAMPIRAN	
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA.....	i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64, telah mengamanatkan tentang pembentukan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, menetapkan 3 (tiga) Bidang sebagai pilar utama yakni Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah.

Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi sebagai berikut:

VISI	MEWUJUDKAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TERLINDUNG DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
-------------	---

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki misi sebagai berikut :

MISI	<ol style="list-style-type: none">1. MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA PROFESIONAL.2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA.3. MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN.
-------------	--

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tujuan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut :

TUJUAN	1. MELINDUNGI DAN MENYELAMATKAN MASYARAKAT DARI PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. 2. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.
---------------	---

Sedangkan Sasaran strategis Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan Proporsional serta berkinerja Tinggi

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan dan 16 (enam belas) target Indikator Kinerja Kegiatan yang didukung oleh 2 (dua) Program dengan 14 (empat belas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Klasifikasi Rincian Output. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dapat diringkas sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran melakukan kegiatan Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat pada 10 sekolah, pelatihan remaja teman sebaya anti narkoba bagi 30 orang remaja, pembentukan 130 relawan anti narkoba dan penyebaran informasi dan edukasi P4GN kepada 17.154 pelajar dan mahasiswa dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba (Dektari) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkategori “Tinggi”.

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi NTT adalah 1 Kabupaten/Kota, dengan rincian berkategori “Sangat Tinggi”, berjumlah 1 Kab/Kota yaitu Kabupaten Belu, berkategori “Tinggi” berjumlah 1 Kab/Kota yaitu Kabupaten Rote Ndao dan 1 Kab/Kota berkategori “Sangat Rendah” yaitu Kota Kupang disebabkan karenan adanya penyesuaian **Automatic Adjustment (AA)** telah mengurangi anggaran pada program informasi dan edukasi sehingga mempengaruhi capaian atau target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Capaian realisasi target Indikator Kineja Kegiatan jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi NTT adalah sebanyak 2 Kab/Kota atau sebesar 66,7 %, dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba kepada 40 melalui Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa pembentukan Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) sebnayak 8 Kelurahan/Desa yaitu Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang; Desa Kuanheun, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang; Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang; Kelurahan Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang; Desa Tohe, Kec. Raihat, Kab. Belu; Kelurahan Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu; Desa Ofalangga, Kec. Pantai Baru, Kab. Rote Ndao; Desa Tesabela, Kec. Pantai Baru, Kab. Rote Ndao, Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyelagunaan Narkoba (Dektara) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 berkategori “ Tinggi”. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Belu ,seluruhnya mencapai target Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyelagunaan Narkoba (Dektara)

yaitu berkategori “tinggi” dengan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 100%, sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi NTT target kinerja 3 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran melakukan kegiatan Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba masing-masing 2 lembaga yaitu Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Kelompok Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan melalui pembentukan penggiat P4GN sebanyak 240 orang dan melaksanakan test urine untuk detekdi dini penyalagunaan narkotika sebanyak 1.752 orang, capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkategori “Sangat Mandiri”. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi target 3 Kab/Kota realisasi 3 Kab/Kota atau sebesar 100%, sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan rincian Kota Kupang Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri”, Kabupaten Belu Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” dan Kabupaten Rote Ndao Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri”..
4. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat serta Pemantauan dan Pendampingan Klien Pascarehabilitasi. Target kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 68 % dengan realisasi kinerja 87.18 % atau sebesar 128.2 %, melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalamii peningkatan kualitas hidup BNN Kabupaten/Kota Jajaran masing-masing sebesar 68 %,

dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Belu 100% atau sebesar 147 %; realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Rote Ndao 100 % atau sebesar 147 % dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kota Kupang 100 % atau sebesar 147 %, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

5. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran melakukan kegiatan pelatihan petugas penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat. Target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 10 Orang dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 10 Orang atau sebesar 100%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran masing-masing 10 Orang, dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Belu 10 Orang atau sebesar 100%; realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Rote Ndao 10 Orang atau sebesar 100% dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kota Kupang 10 Orang atau sebesar 100%, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi target Indikator Kinerja Kegiatan 1 Lembaga. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama bagi penyalaguna narkoba. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi sebesar 1 Lembaga atau 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran 1 Lembaga, dengan realisasi kinerja BNN Kabupaten Belu 1 Lembaga atau sebesar 100%; realisasi kinerja BNN Kabupaten Rote Ndao 1 Lembaga atau

sebesar 100% dan realisasi kinerja BNN Kota Kupang 1 Lembaga atau sebesar 100%, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

7. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional target Indikator Kinerja Kegiatan 8 unit. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajaran melakukan kegiatan Pembentukan unit IBM. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional sebesar 8 Unit atau sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran 2 Unit, dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Belu 2 Unit atau sebesar 100%; realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kabupaten Rote Ndao 2 Unit atau sebesar 100% dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan BNN Kota Kupang 2 Unit atau sebesar 100%, masing-masing realisasi BNN Kabupaten/Kota Jajaran sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN target Indikator Kinerja Kegiatan 3.77 indeks . Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama kepada masyarakat. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Provinsi NTT sebesar 3.77 Indeks atau sebesar 100 %, sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN masing-masing BNN Kabupaten/Kota jajaran, BNN Kabupaten Belu target Indikator Kinerja Kegiatan 3.06 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 3.8 Indeks atau sebesar 124.2 %, melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan; BNN Kota Kupang target Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 2.60 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3.55 Indeks atau sebesar 136.5 % , melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan; BNN Kabupaten Rote Ndao target Indikator Kinerja Kegiatan

3.77 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 3.91 Indeks atau sebesar 103.7 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

9. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 target kinerja 3 berkas perkara. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 sebesar 4 berkas perkara dengan persentase capaian kinerja sebesar 133 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.
10. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target Indikator Kinerja Kegiatan 100 indeks. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan sebesar 100 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 %, mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika target 100. Untuk mendukung IKK tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai tingkat kemanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebesar 100 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara target kinerja 89 indeks . Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan Nilai Kinerja data *SMART*

(Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara sebesar 94.50 Indeks atau 106,2 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

13. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 1 BNN Kabupaten / Kota. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Jajaran melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan Nilai Kinerja data SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target sebesar 3 Kab/Kota atau sebesar 300 %, diatas dari target yang telah ditetapkan. Dengan rincian BNN Kabupaten Belu target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN 87 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN 99.95 Indeks atau sebesar 114.9 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan ; BNN Kota Kupang target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN 87 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN 98.98 Indeks atau sebesar 113.8 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan; dan BNN Kabupaten Rote Ndao target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN 80 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN 94.57 Indeks atau sebesar 118,21 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.
14. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur target 94.65 Indeks . Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan Monev PA (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Keuangan, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 89.56 Indeks atau 94.6 %, dibawah dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan perencanaan anggaran belanja pegawai melebihi pagu anggaran belanja pegawai sehingga realisasi anggaran tidak tercapai yang mempengaruhi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

15. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, target 3 BNN Kabupaten / Kota. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Jaringan melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan Monev PA (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Keuangan, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target sebesar 2 Kab/Kota atau sebesar 66.7 %, dibawah dari target yang telah ditetapkan. Dengan rincian BNN Kabupaten Belu target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 95 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 99.90 Indeks atau sebesar 105.5 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan ; BNN Kota Kupang target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 97.39 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 97.96 Indeks atau sebesar 100.6 %, melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan; dan BNN Kabupaten Rote Ndao target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 97.33 Indeks, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 92.88 Indeks atau sebesar 95.4 %, dibawah dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan Kualitas perencanaan anggaran khususnya nilai deviasi hal III dipa tidak mencapai target dan Kualitas pelaksanaan anggaran pada belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan tidak mencapai target pada BNN Kabupaten Rote Ndao sehingga mempengaruhi target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Wilayah Provinsi.

16. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal target 75 Indeks . Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal sebesar 68.21 Indeks atau sebesar 95,4%, dibawah dari target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum adanya dukungan Aparatur Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif dalam melakukan pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Berdasarkan capaian realisasi target Indikator Kinerja Kegiatan Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan diatas target berjumlah 4 (empat); Indikator Kinerja Kegiatan sesuai target berjumlah 8 (delapan); dan Indikator Kinerja Kegiatan dibawah target berjumlah 4 (empat). Maka direkomendasi langkah-langkah peningkatan target Indikator Kinerja Kegiatan Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya konsistensi dari pengambil kebijakan di daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, DPRD maupun seluruh stakeholder) untuk melaksanakan kebijakan P4GN tersebut, untuk diimplementasikan secara berkesinambungan.
2. Memaksimalkan capaian kinerja efektifitas diseminasi informasi P4GN dapat dilakukan dengan cara setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi, harus ada keinginan untuk turut berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran di lingkungan kerja, pendidikan dan masyarakat. Perlu meningkatkan efektivitas media luar ruang untuk memberikan informasi atau pesan bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Perlu adanya peran aktif penggiat anti narkoba dalam mendukung program P4GN di lingkungan masyarakat setelah mengikuti pengembangan kapasitas.
4. Meningkatkan kesadaran untuk secara mandiri atau swadaya dalam menginisiasi masyarakat dan stakeholder guna memperoleh dukungan anggaran pelaksanaan program P4GN.

5. Perlu meningkatkan informasi kepada masyarakat mengenai program layanan rehabilitasi instansi pemerintah dan layanan rehabilitasi komponen masyarakat (klinik pratama BNNP/BNNK, RSUD, puskesmas dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat).
6. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum di lapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target dan mengevaluasi serta mengintensifikan kerjasama yang telah terjalin.
7. Meningkatkan pemetaan wilayah narkoba dan meningkatkan penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika dalam rangka pengungkapan kasus penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perlu peningkatan kompetensi dan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan daftar susunan pegawai pada Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara, terutama yang berkaitan dengan personil Pemberantasan, Rehabilitasi, Analis Kesehatan, Keuangan, Perencanaan dan Penyuluh.
9. Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan, meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.
10. Meningkatkan komitmen setiap kelompok kerja dalam menyiapkan pemenuhan dokumen pada setiap area pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana pembangunan Zona Integritas yang sudah ditetapkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Terhindar dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkotika dalam rangka Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, selaras dengan visi tersebut, BNN Propinsi Nusa Tenggara Timur berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), salah satunya melalui penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN ; pelayanan administrasi BNNP; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP, sedangkan BNN Kabupaten dan Kota melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah

Kabupaten/Kota; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2023 Pemerintah mengalokasikan anggaran melalui program dan kegiatan dalam rangka mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan berakhirnya Tahun anggaran 2023, Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi vertikal BNN di daerah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP dan BNNK/Kota. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 ini telah merujuk pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Kedudukan

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi;
- b. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. BNNP dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas Pokok

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi :

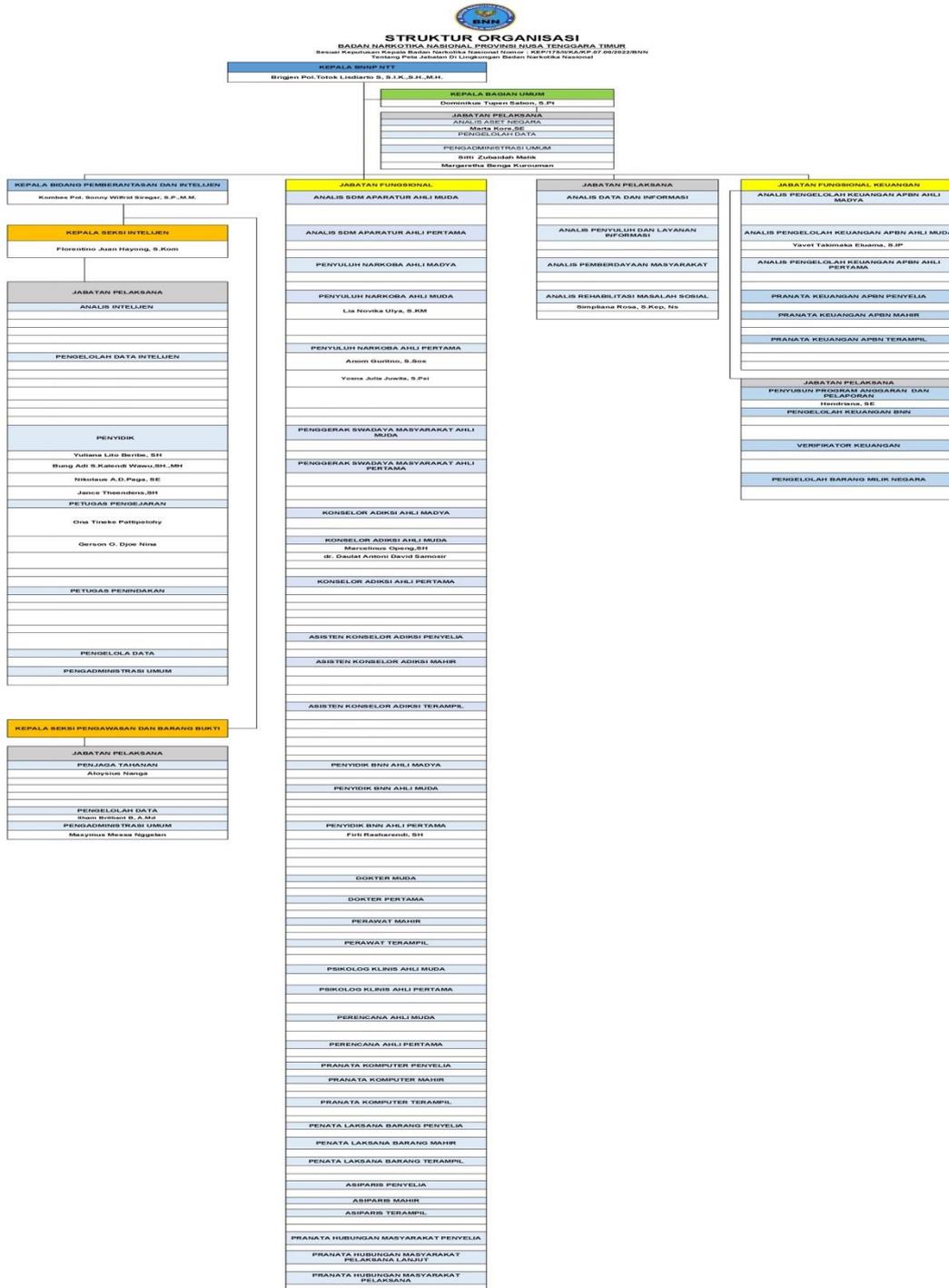
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi , dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum kerja sama dalam wilayah Provinsi P4GN.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administratif BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 175 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi; dan
5. Bidang Pemberantasan dan Intelijen.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur :



Dalam menjalankan organisasi, Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 119 orang yang terdiri dari PNS Organik BNN, Penugasan dari instansi Polri, dan PPNPN, dengan rincian sebagai berikut :

NO	SATKER	POLRI	PNS BNN	JML	DSP	KET (+/-)	PPNPN	TOTAL PEGAWAI
1	BNNP NTT	10	17	27	153	-126	23	50
2	BNNK BELU	1	12	13	74	-61	13	26
3	BNN KOTA KUPANG	2	5	7	74	-67	14	21
4	BNNK ROTE NDAO	-	8	8	74	-66	14	22
	JUMLAH	13	42	55	375	-320	64	119

Dengan kondisi kelembagaan dan SDM sebagaimana tersebut di atas, maka Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terus membutuhkan upaya pengembangan SDM sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggungjawab yang dibutuhkannya. Untuk itu Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumberdaya yang tersedia secara cermat untuk mengoptimisasi pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba sesuai dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun menengah yang tertuang dalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis / Rencana Program Kerja

Sasaran strategis tahun 2024 yang merupakan periode terakhir RPKJM Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

ARAH STRATEGIS	<ol style="list-style-type: none">1. MENINGKATKAN PENANGANAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA2. TERWUJUDNYA MANAJEMEN ORGANISASI YANG PROPOROSIONAL, PRODUKTIF DAN PROFESIONAL SERTA BEKERJA TINGGI
-----------------------	---

Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNNP Nusa Tenggara Timur dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNNP Nusa Tenggara Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan resources dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Strategi Operasional

Sasaran strategi operasional Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Tujuan (1) :

- a. Mengefektifkan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan TPPU tindak pidana narkoba
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21
- b. Desa Bersih Narkoba
Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Fasilitas dan Pembinaan Keluarga
- c. Standarisasi Layanan Rehabilitasi Medis dan Sosial
Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Standarisasi Profesi SDM dan Sertifikasi Profesi dan SDM
- d. Pemberdayaan Alternatif
Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan Relawan/Penggiat Anti Narkoba
Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

2. Sasaran Kegiatan Tujuan (4) :

- a. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja..

B. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran sasaran dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020 – 2024.

Didalam Rencana Program Kerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang ditungkan dalam perjanjian kinerja antara Kepala BNN RI dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala BNN Kab/Kota dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 (satu) Tahun Anggaran .

Perjanjian Kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen antara Kepala BNN RI dengan Kepala

BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala BNN Kab/Kota dengan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan P4GN di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja**Unit Organisasi Eselon II : BNNP Nusa Tenggara Timur****Tahun Anggaran : 2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten / Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten / Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten / Kota
4	Meningkatkan Upaya Pemulihan Penyalaguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase Penyalaguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitas narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah Provinsi	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitas narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	8 Unit

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.77 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100 Indeks
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	89 Indeks
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1 Kabupaten / Kota
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	97.36 Indeks
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota
16	Meningkatkan pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	410.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	434.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	895.760.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	83.720.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	419.890.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	45.295.000
7. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	75.000.000
8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkotika	Rp.	250.000.000
9. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	103.117.000
10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	6.902.402.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	62.680.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	51.276.000
13. Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	5.466.063.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	50.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisi Capaian Sasaran Organisasi Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2024 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan dan 16 (enam belas) target Indikator Kinerja Kegiatan yang didukung oleh 2 (dua) Program dengan 14 (empat belas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Klasifikasi Rincian Output.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilakukan Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu tahun 2024, evaluasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan perlu dilakukan dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian Indikator Kinerja Kegiatan baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024 merupakan capaian kinerja akhir RPKJM Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 – 2024, sebagaimana diatur dalam perjanjian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

Tahun 2024 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN yang menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 :

1.

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi

Defenisi operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebanyak 3 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kegiatan Pengembangan Keterampilan Hidup (*softskill*) di SMP dan SMU sederajat dan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika tingkat BNNK, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi NTT Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	3 kab/kota	2 kab/kota	66.7 %

b. Metode Pengukuran dan analisis realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2024 serta perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan tahun sebelumnya

❖ Metode Pengukuran

Perhitungan menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 Tahun (Pelajar atau Mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi pengembangan *softskill* anti narkoba oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, melalui pengisian mengisi kuesioner. Jawaban responden akan menggambarkan kemampuan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang meliputi dimensi:

a. Self regulation

Kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.

b. Assertiveness

Kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.

c. Reaching out

Kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Adapun klasifikasi Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi ($\geq 53,71$)
- 2) Kategori tinggi (49,74 – 53,50)
- 3) Kategori rendah (45,98 – 49,73)
- 4) Kategori sangat rendah ($\leq 45,97$)

❖ **Analisis realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2024 serta perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan tahun sebelumnya**

📊 **Analisis realisasi kinerja**

Tabel Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba pada tingkat BNNP dan BNNK Jajaran Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%	Kategori
1	BNNP NTT	51.51	55.16	107.02	Tinggi
2	BNNK Belu	56.20	55.55	98.8	Sangat Tinggi
3	BNN Kota Kupang	53.65	40.98	76.4	Sangat Rendah
4	BNNK Ndao	52	51.24	98.5	Tinggi
Rata-Rata Provinsi NTT		53.35	50.73	95.34	Tinggi

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil perhitungan indeks ketahanan diri anti narkoba terhadap remaja usia 12 s.d. 21 tahun (pelajar dan mahasiswa) yang telah dilakukan penyuluhan/sosialisasi sebanyak 21.229

orang oleh penyuluh BNNP dan BNNK berkategori “tinggi” di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai indeks Dektari 50.73.

Analisa pengukuran indeks dari jawaban para responden ini dihitung secara *online* pada aplikasi Dektari Aja, dan didapatkan hasil capaian tiap Kabupaten sesuai kategorisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja. Analisa pengukuran indeks dari jawaban para responden ini dihitung secara *online* pada aplikasi Dektari Aja, dan didapatkan hasil capaian tiap Kabupaten sesuai kategorisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja sebagaimana table diatas. Adapun dari 3 Kabupaten/Kota jajaran BNNP NTT, 1 Kab/Kota memiliki capaian Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Sangat Tinggi” yaitu Kabupaten Belu; 1 Kab/Kota memiliki Indeks Ketahanan Diri “Tinggi” yaitu Kabupaten Rote Ndao; dan 1 Kab/Kota memiliki capaian Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Sangat Rendah” yaitu Kota Kupang, hal ini disebabkan karenan adanya penyesuaian **Automatic Adjustment (AA)** telah mengurangi anggaran pada program informasi dan edukasi sehingga mempengaruhi capaian atau target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan

Adapun perhitungan persentase jumlah kabupaten/kota dengan capaian Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebagai berikut :

Perhitungan Capaian :

% Capaian	3 Kab/Kota	x 100% = 66.7 %
	2 Kab/Kota	

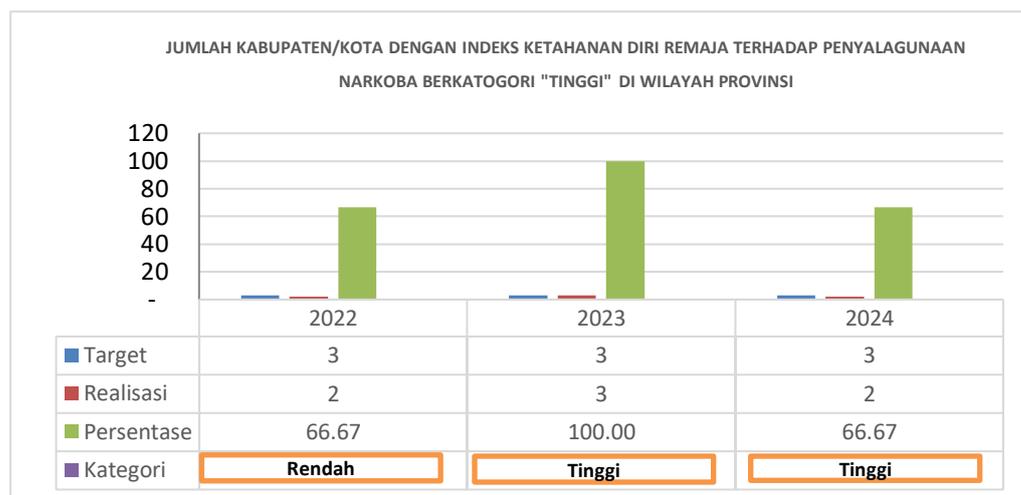
Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

Data pembanding realisasi target kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi

tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran

1. BNNP Nusa Tenggara Timur

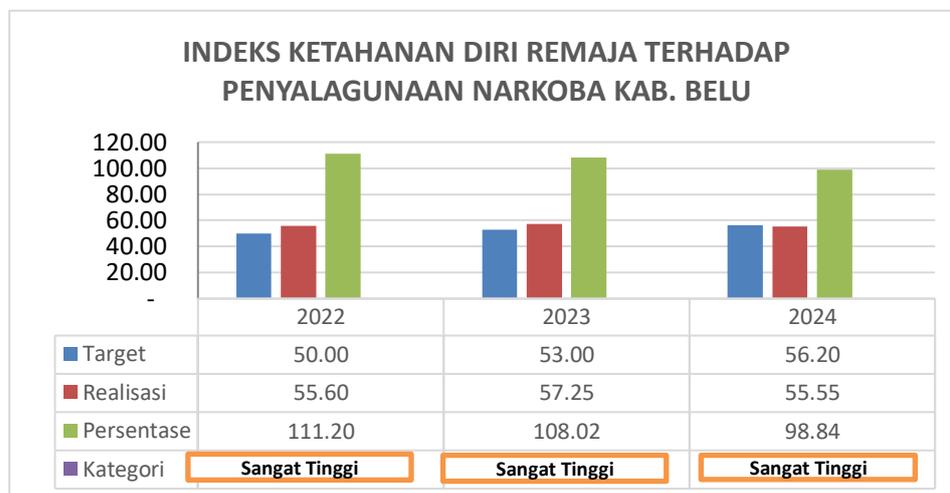
Grafik realisasi target Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Kab/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi tahun 2022 s.d. 2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi. Bila dibandingkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya tahun 2022 dan 2023, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan atau sebesar 66.67 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian **Automatic Adjustment (AA)** telah mengurangi anggaran pada program informasi dan edukasi BNN Kota Kupang sehingga mempengaruhi capaian atau target mempengaruhi capaian atau target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba.

2. BNN Kabupaten Belu

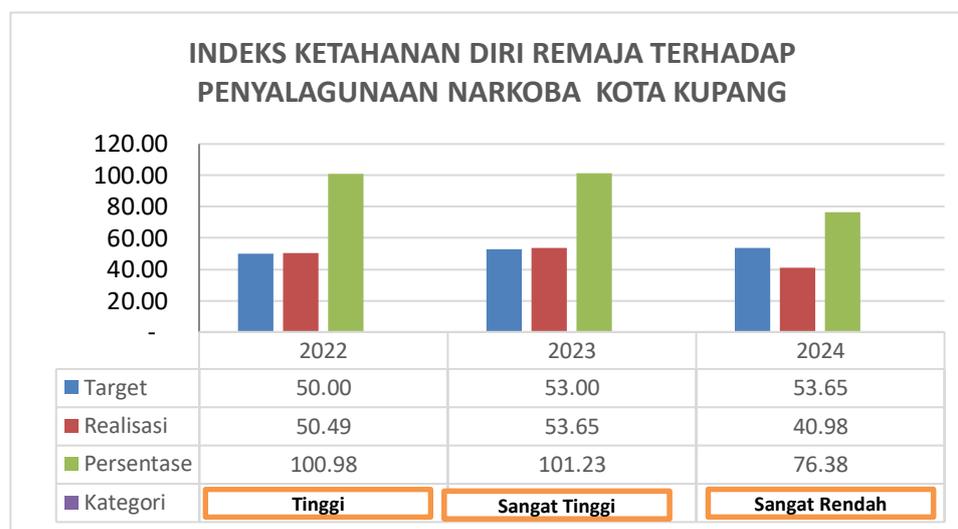
Grafik capaian Indikator Kinerja Kegiatan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba tahun 2022 s.d 2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba Kabupaten Belu Tahun 2022 s.d 2024. Dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 Capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “sangat tinggi”, sama dengan capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba Tahun 2022 dan 2024 yaitu berkategori “sangat tinggi” melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

3. BNN Kota Kupang

Grafik capain Indikator Kinerja Kegiatan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba tahun 2022 s.d 2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba Kota Kupang Tahun 2022 s.d. 2024. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “sangat rendah”, dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba Tahun 2022 berkategori “tinggi” dan Tahun 2023 berkategori “Sangat Tinggi”, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian **Automatic Adjustment (AA)** telah mengurangi anggaran pada program informasi dan edukasi BNN Kota Kupang sehingga mempengaruhi capaian atau target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba.

4. BNN Kabupaten Rote Ndao

Grafik capaian Indikator Kinerja Kegiatan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba tahun 2022 s.d 2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 s.d 2024. Dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2024 Capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi”, sama dengan capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba Tahun 2022 dan 2023 yaitu berkategori “tinggi” , sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan Kabupaten/Kota memiliki indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi”, hal ini didukung beberapa faktor antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi yang tersusun secara baik melalui pembuatan timeline.

2. Koordinasi yang baik antara BNNP NTT dan Jaringan dengan stakeholder terkait.
3. Partisipasi aktif stakeholder dalam mendukung program kerja BNNP NTT dan Jaringan.
4. Pelaksanaan sosialisasi kepada remaja sesuai dengan dimensi ketahanan diri remaja anti narkoba.
5. Pemahaman sasaran terhadap konsep ketahanan diri dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6. Metode sosialisasi cukup efektif meningkatkan pemahaman remaja terhadap pencegahan narkoba.
7. Keterpedulian dan partisipasi aktif lingkungan sekolah dalam upaya P4GN yang melibatkan pada siswa/i pada berbagai program relevan dengan program P4GN di sekolah.

d. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi BNN Kabupaten/Kota Jaringan terhadap pencapaian target kinerja tersebut diatas, antara lain :

1. Kurangnya SDM Penyuluh Narkoba sebagai fasilitator di Kabupaten/Kota.
2. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari tidak didampingi dan dipandu oleh Fasilitator, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman isi kuesioner dan kesalahan dalam penginputan.
3. Adanya penyesuaian ***Automatic Adjustment (AA)*** telah mengurangi anggaran pada program informasi dan edukasi sehingga mempengaruhi capaian atau target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba.

e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut
Menyebarkan informasi P4GN melalui berbagai metode dan media yang sesuai perkembangan jaman secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat:

- 1) Menyebarkan informasi P4GN melalui berbagai metode dan media yang sesuai perkembangan jaman secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan media untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.
- 3) Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan KIE tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat seperti lomba-lomba kreatif yang melibatkan masyarakat.
- 4) Membuat terobosan yang inovatif dan masif dalam KIE P4GN seperti melalui Lembaga Pendidikan dengan mengintegrasikan materi Pendidikan anti narkoba kedalam kurikulum mata pelajaran.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan di lingkup BNNP dan BNNK/Kota.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.
- 7) Peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan.

f. Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2024

Inovasi yang telah dilakukan oleh Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya meningkatkan ketahanan diri remaja anti narkoba selama tahun 2024 antara lain :

- 1) Penyebarluasan informasi dan edukasi P4GN melalui penyiaran podcast .

- 2) Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui konten kreatif di media sosial BNNP NTT Jajaran;
- 3) Memberikan layanan sosialisasi/penyuluhan secara berkeliling dan stationer di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
- 4) CFD Sehat bersinar bersama BNN setiap hari Sabtu di arena CFD Kota Kupang.
- 5) KIE Goes to School melalui sosialisasi P4GN pada kegiatan upacara di sekolah, MPLS, P5 dan kegiatan pramuka.
- 6) Menggelorakan Mars BNN di sekolah-sekolah, ruang publik dan media elektronik melalui kerja sama dengan radio dan televisi.
- 7) Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan seperti Kwarda dan Kwarcab dalam peningkatan KIE P4GN dengan Pelajar secara berkelanjutan.

2.

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi

Defenisi operasional Indeks ketahanan keluarga anti narkoba adalah pengukuran keterampilan hidup keluarga anti narkoba dalam membentuk daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam perjanjian kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kabupaten/Kota Jajaran pada Tahun 2024 target Indikator Kinerja Kegiatan Kabupaten/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi sebanyak 3 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kegiatan advokasi pembangunan berawasan anti narkoba yang telah dilaksanakan oleh BNN NTT dan BNNK Jajaran Tahun 2024 melalui Pendampingan Program Ketahanan Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota

dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kab/Kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	3 kab/kota	3 kab/kota	100 %

b. Metode pengukuran dan analisis realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2024 serta data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan tahun sebelumnya.

❖ **Metode Pengukuran**

Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba melalui pengisian kuesioner secara *online* menggunakan aplikasi dektara yaitu setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (Keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Fasilitator memandu peserta dalam mengisi aplikasi untuk mengukur sejauh mana keluarga memiliki keterampilan hidup anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba, antara lain :

- 1) *Belief system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) *Organizational Process (proses organisasi)*. Struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 3) *Communication/problem-solving processes (proses komunikasi)*. Suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di

dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Adapun klasifikasi Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai berikut :

- 5) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00)
- 6) Kategori tinggi (76,61 – 88,30)
- 7) Kategori rendah (65,00 – 76,60)
- 8) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99)

❖ **Analisis realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2024 serta perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan tahun sebelumnya**

✚ **Analisis realisasi kinerja**

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan nilai Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada tingkat BNNP dan BNNK Jajaran sebagai berikut :

No	BNNK	Target	Realisasi	%	Kategori
1	BNNP NTT	87.589	88.929	111.32	Sangat Tinggi
2	Belu	85.625	76.696	108.6	Tinggi
3	Kota Kupang	81.339	84.375	105.6	Tinggi
4	Rote Ndao	88.125	85.893	114.9	Tinggi

Dari pengukuran secara *online*, diperoleh hasil bahwa dari 3 kabupaten/kota memiliki indeks ketahanan keluarga semuanya berkategori “tinggi”. Adapun perhitungan persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga berkategori “Tinggi” sebagai berikut :

Perhitungan Capaian :

$$\text{Realisasi : } \frac{3 \text{ Kab/Kota}}{3 \text{ Kab/Kota}} \times 100 \% = 100 \%$$

✚ Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan tahun sebelumnya

Berikut disajikan data pembandingan realisasi target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.

1. BNNP Nusa Tenggara Timur



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsitahun 2024 sebesar 100%. Bila dibandingkan realisasi kinerja realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi tahun 2024 dengan tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi dari berkategori

“rendah” pada tahun 2022 menjadi berkategori “tinggi” di tahun 2023 dan 2024. Ada beberapa faktor pendukung peningkatan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pendampingan Program Ketahanan Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa BNNP Nusa Tenggara Timur dan Jaringan sudah berjalan dengan baik. karena didukung oleh SDM/ fasilitator yang profesional..
- 2) Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga Anti Narkoba.
- 3) Ketahanan keluarga sudah menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait.

2. BNN Kabupaten Belu

Grafik capaian kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba tahun 2022 s.d 2024 :



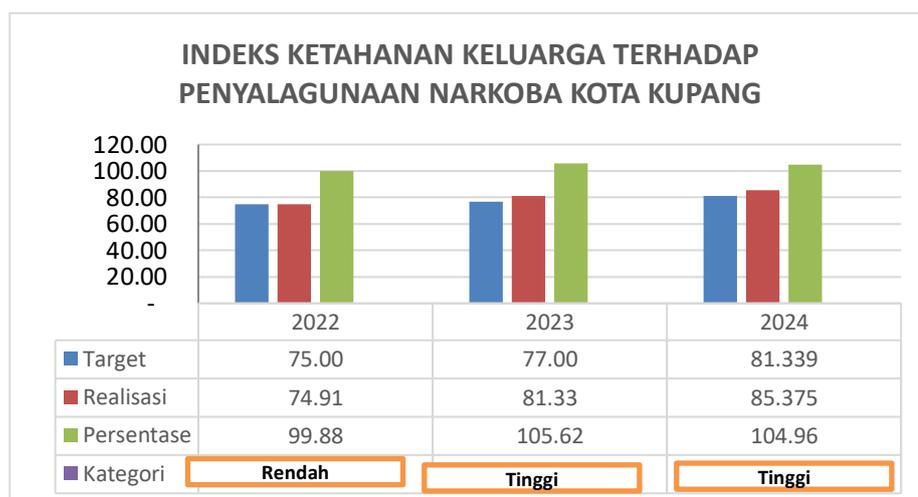
Grafik diatas menggambarkan perbandingan capaian Realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba Kabupaten Belu tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 mencapai target capaian yang telah ditetapkan atau berkategori “tinggi” bila dibandingkan dengan tahun 2022 tidak mencapai target capaian kinerja atau berkategori “rendah”. Ada beberapa

faktor pendukung peningkatan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pendampingan Program Ketahanan Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa BNNK Belu sudah berjalan dengan baik. karena didukung oleh SDM/ fasilitator yang profesional..
- 2) Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga Anti Narkoba.
- 3) Ketahanan keluarga sudah menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait.

3. BNN Kota Kupang

Grafik capaian kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba tahun 2022 s.d 2024 :



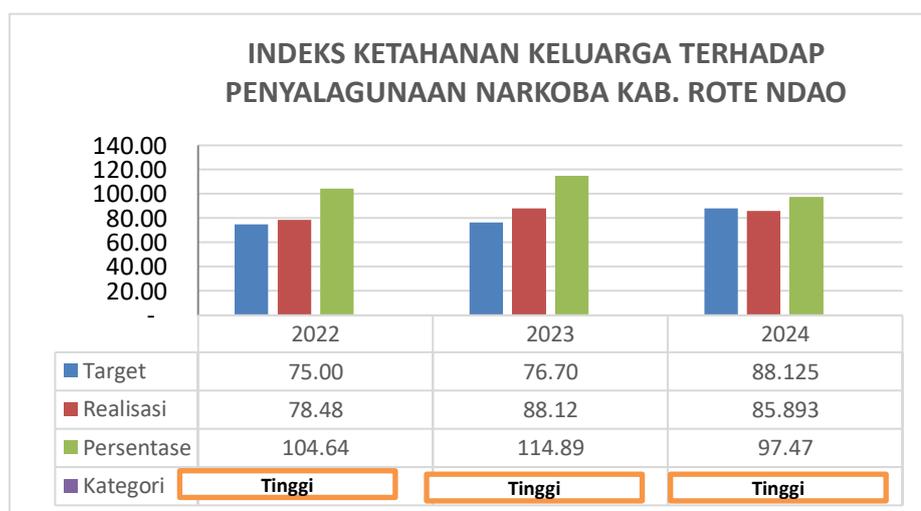
Grafik diatas menggambarkan perbandingan capaian Realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba Kota Kupang tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan atau berkategori “tinggi” bila dibandingkan dengan tahun 2022 tidak mencapai target capaian kinerja atau berkategori “rendah”. Ada beberapa

faktor pendukung peningkatan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pendampingan Program Ketahanan Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa BNN Kota Kupang sudah berjalan dengan baik. karena didukung oleh SDM/ fasilitator yang profesional..
- 2) Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga Anti Narkoba.
- 3) Ketahanan keluarga sudah menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait.

4. BNN Kabupaten Rote Ndao

Grafik capaian indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba tahun 2022 s.d 2024 :



Grafik diatas menggambarkan perbandingan capaian Realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2022 s.d 2024 mencapai target capaian yang telah ditetapkan atau berkategori “tinggi”.

Ada beberapa faktor pendukung peningkatan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

- 1) Pelaksanaan Pendampingan Program Ketahanan Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa BNN Kabupaten Rote Ndao sudah berjalan dengan baik. karena didukung oleh SDM/ fasilitator yang profesional..
- 2) Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga Anti Narkoba.
- 3) Ketahanan keluarga sudah menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan tiga Kabupaten/Kota memiliki indeks ketahanan keluarga berkategori tinggi, hal ini didukung beberapa faktor antara lain :

1. Pelaksanaan Pendampingan Program Ketahanan Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa fasilitasi ketahanan keluarga anti narkoba di Kab/Kota sudah berjalan maksimal, didukung SDM yang sudah berkompeten sebagai fasilitator.
2. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektara sudah sesuai dengan ketentuan.
3. Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga.
4. Partisipasi stakeholder di Desa dan Kelurahan dalam upaya P4GN cukup aktif melalui sinergi dan kolaborasi kegiatan-kegiatan bersama anti narkoba.
5. Konsistensi praktek peserta pasca fasilitasi sudah berjalan maksimal.
6. Ketahanan keluarga sudah menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait.

d. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pelaksana program dalam rangkaian pelaksanaan Pendampingan Program Ketahanan Anti Narkoba dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa pada tahun 2024 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Provinsi kepulauan sehingga perlu adanya penambahan anggaran di tahun akan datang untuk mendukung pelaksanaan program Ketahanan Keluarga Anti narkoba Berbasis Sumber Daya Desa serta masih kurangnya SDM/fasilitator.

e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks ketahanan keluarga anti narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Nusa Tenggara Timur, maka rencana aksi dan strategi kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan petugas/fasilitator melalui pelatihan/pembekalan/workshop.
- 2) Memilih peserta ketahanan keluarga lebih selektif lagi berdasarkan aspek responsif dan partisipasi aktif di lingkungan masyarakat, serta merupakan warga masyarakat yang menjadi tokoh/panutan di lingkungannya.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga.
- 4) Peningkatan pengawasan atau evaluasi dalam pelaksanaan ketahanan keluarga.

f. Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2024

Inovasi yang telah dilakukan oleh Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya meningkatkan indeks ketahanan keluarga anti narkoba selama tahun 2024 antara lain :

- 1) Deklarasi Anti Narkoba Masyarakat Pesisir Kota Kupang dan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.
- 2) Kegiatan ikonik : pemilihan Duta Anti Narkoba NTT.

- 3) Penyebarluasan informasi dan edukasi P4GN untuk masyarakat NTT melalui penyiaran podcast.
- 4) Memberikan layanan sosialisasi/penyuluhan secara berkeliling dan stationer di wilayah Kota Kupang hingga Kabupaten Kupang dengan menggunakan Mobil Layanan Masyarakat BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 5) CFD Sehat Bersinar Bersama BNN setiap hari Sabtu di area CFD Kota Kupang.
- 6) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Goes to School : sosialisasi P4GN di sekolah – sekolah.
- 7) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Pasiar Desa Bersinar : senam sehat anti narkoba bersama masyarakat di Desa Bersinar.
- 8) Menggelorakan Mars BNN di sekolah – sekolah, ruang public dan media elektronik melalui kerja sama dengan radioa dan televisi di Kota Kupang.
- 9) Pengelolaan media sosial dengan konten unggulan : Santun, Warung Mince Series, dan Si Pena.

3.

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi

Defenisi operasional Indeks Kemandirian Partisipasi adalah Pengukuran kemandirian penggiat anti narkoba yang berperan aktif dalam program pemberdayaan anti narkoba di lingkungannya, meliputi lingkungan instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Diharapkan peran penggiat anti narkoba secara mandiri dalam P4GN ini mampu berdaya guna dan berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Target perjanjian kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi sebanyak 3 Kab/Kota, dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Satker	Target	Realisasi	% Realisasi
1	BNNP NTT	3	3	100 %

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi

❖ Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks kemandirian partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN diukur menggunakan kuesioner IKP yang meliputi 5 aspek yaitu: aspek manusia, metode, anggaran, sistem, sarana prasarana, dan kegiatan. Kuesioner dibagikan dan diisi oleh penggiat anti narkoba dari instansi/lembaga yang telah mendapatkan pengembangan kapasitas P4GN baik melalui workshop maupun bimtek P4GN. Untuk memperoleh nilai IKP dari masing – masing lembaga, penghitungan dilakukan dengan rumus :

$$\text{IKP} = \frac{\text{Hasil Perhitungan Kuesioner}}{25}$$

Kemudian dari hasil indeks yang diperoleh dapat ditentukan kategori kemandirian dengan interval sebagai berikut :

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Mandiri

Adapun rincian capaian indeks kemandirian partisipasi penggiat anti narkoba di wilayah BNNP NTT dan jajaran per lingkungan tahun 2024 sebagai berikut :

NO	Satker	Instansi Pemerintah	Dunia Usaha/ swasta	Lingk. Masyar akat	Lingk.P endidik an	=Σ% capaian indeks	Kategori/ Kriteria
1	BNNP NTT	3.47	-	-	3.48	3.48	Sangat Mandiri
2	BNNK Kupang	3.69	-	-	3.39	3.54	Sangat Mandiri
3	BNNK Rote Ndao	-	-	3.62	3.36	3.49	Sangat Mandiri
4	BNNK Belu	-	-	3.34	3.37	3.36	Sangat Mandiri

Tabel Indeks Kemandirian Partisipasi Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di Lingkungan BNNP NTT Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	Satker	KRITERIA	PERHITUNGAN			
			PMRNTH	SWASTA	MASY.	PNDKKN
1	BNNP NTT	Nilai IKP Setelah Dikonversi	3.47	-	-	3.48
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	86.75	-	-	87.00
		Kategori IKP	A	-	-	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	Sangat Mandiri	-	-	Sangat Mandiri
2	BNNK Kupang	Nilai IKP Setelah Dikonversi	3.69	-	-	3.39
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	92.30	-	-	84.80
		Kategori IKP	A	-	-	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	Sangat Mandiri	-	-	Sangat Mandiri
3	BNNK Rote Ndao	Nilai IKP Setelah Dikonversi	-	-	3.62	3.36
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	-	-	90.50	84.00
		Kategori IKP	-	-	A	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	-	-	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri
4	BNNK Belu	Nilai IKP Setelah Dikonversi	-	-	3.34	3.37
		Nilai Interval Konversi Dikalikan 25	-	-	83.50	84.30
		Kategori IKP	-	-	A	A
		Kriteria Kemandirian Partisipasi	-	-	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri

Perhitungan Capaian :

Realisasi:	$\frac{3 \text{ Kab/Kota}}{3 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% = 100\%$
------------	--

Dari data diatas Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi “Mandiri” di Wilayah Provinsi adalah sebanyak 3 BNN Kab/Kota dengan capaian

target Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 100 persen. Dapat disimpulkan capaian target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran berkategori “Sangat Mandiri”.

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi serta Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun Sebelumnya**

✚ **Analisis Realisasi Kinerja**

Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran sebagai berikut :

No	BNNP/BNNK	Target (Indeks)	Realisasi (indeks)	%	Kategori
1	BNNP NTT	3.43	3.48	101.46	Sangat Mandiri
2	Belu	3.25	3.49	107.4	Sangat Mandiri
3	Kota Kupang	3.53	3.54	100.3	Sangat Mandiri
4	Rote Ndao	3.34	3.37	100.9	Sangat Mandiri
	IKP NTT	3.39	3.47	102.44	Sangat Mandiri

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran berkategori “Sangat Mandiri”.

Tabel Capaian Advokasi Lembaga Berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba Tahun 2024 :

NO	Satker	Instansi Pemerintah	Instansi swasta	Kelompok Masyarakat	Lingkungan pendidikan
1	BNNP NTT	1. Badan Kesbangpol Kab. Sikka (3.68) 2. Dinas P3AP2KB Provinsi NTT (3.84)	-	-	1. Politani Kupang (3.76) 2. SMPS Katolik Santo Gabriel (3.56)

2	BNNK Belu	-	-	1. Desa Jenilu (3.76) 2. Desa Tulakadi (3.76)	1. SMPN 2 Tasifeto Timur (3.60) 2. Politeknik Ben Mboi Unhan RI (3.68)
3	BNN Kota Kupang	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4.00) 2. Kementerian Agama Kota Kupang (4.00)	-	-	1. SMPK Muder Teresa (4.00) 2. SMPN 19 Kupang 3 (4.00)
4	BNNK Rote Ndao	-	-	1. Kec. Pantai Baru (3.74) 2. Kec. Rote Selatan (3.64)	1. SMP Negeri 1 Pantai Baru (3.80) 2. SMP Negeri 3 Pantai Baru (3.76)

Adapun perhitungan persentase capaian jumlah Kabupaten /Kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di Wilayah Provinsi

Perhitungan Capaian :

Realisasi:	$\frac{3 \text{ Kab/Kota}}{3 \text{ Kab/Kota}} \times 100\% = 100\%$
------------	--

Dari data diatas Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi “Mandiri” pada tingkat BNNK adalah sebanyak 3 BNN Kab/Kota, dengan capaian target sebesar 100 persen.

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun Sebelumnya

Data pembandingan realisasi target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran.

1. BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur

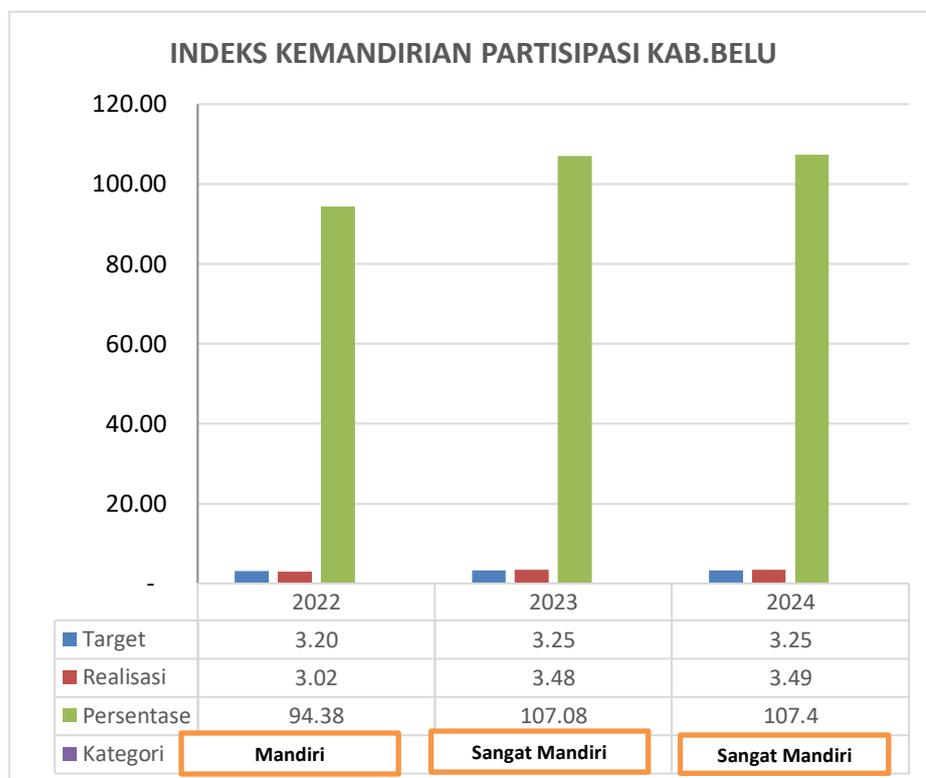
Grafik realisasi target Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Kab/Kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi tahun 2022 s.d 2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Kab/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “ mandiri “ di wilayah provinsi. Bila dibandingkan realisasi Indikator kinerja Kegiatan jumlah Kab/Kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “ mandiri “ di wilayah provinsi tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Tahun 2023 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi diatas dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dengan kategori “sangat mandiri” sedangkan di tahun 2022 realisasi Indikator kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan berkategori “ Mandiri”.

2. BNN Kabupaten Belu

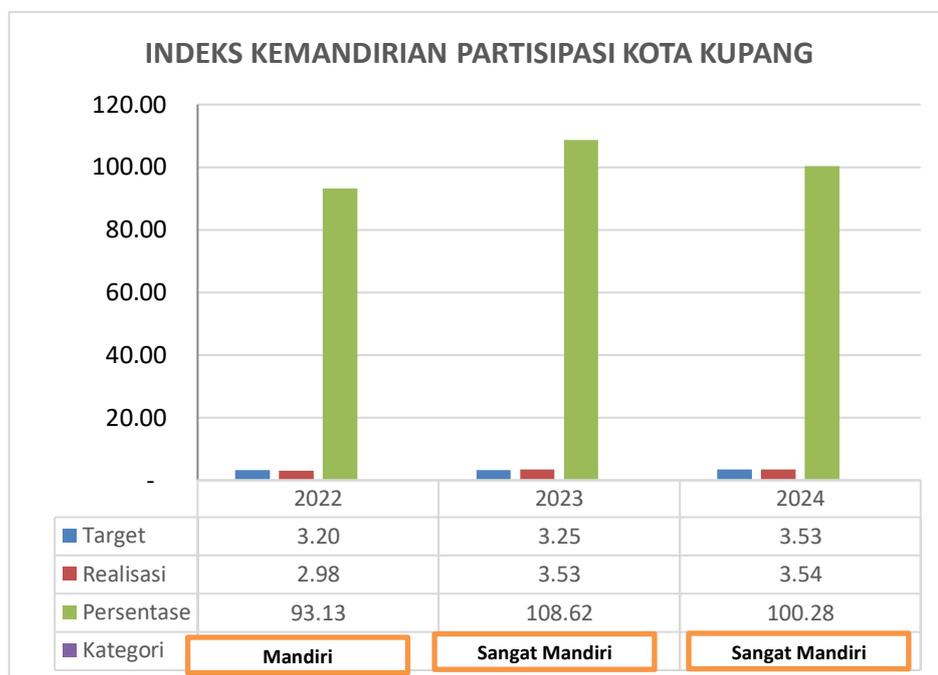
Grafik capaian Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi tahun 2022 s.d.2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi berkategori “ mandiri “ Kabupaten Belu tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Tahun 2023 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi melebihi dari target dengan kategori “sangat mandiri” sedangkan di tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi mencapai target yang telah ditetapkan berkategori “ Mandiri”.

3. BNN Kota Kupang

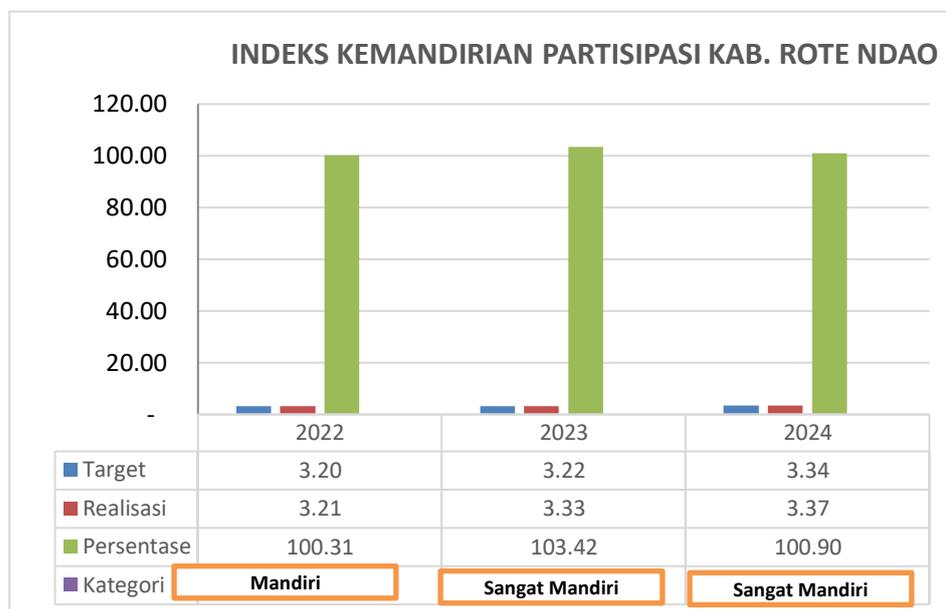
Grafik capaian Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi tahun 2022 s.d.2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” Kota Kupang tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Tahun 2023 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi melebihi dari target dengan kategori “sangat mandiri” sedangkan di tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi mencapai target yang telah ditetapkan berkategori “Mandiri”.

4. BNN Kabupaten Rote Ndao

Grafik capaian Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi tahun 2022 s.d.2024 :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 bila dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Tahun 2023 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi melebihi dari target dengan kategori “sangat mandiri” sedangkan di tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi mencapai target yang telah ditetapkan berkategori “Mandiri”.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” yang mencapai 3 Kabupaten/Kota yang berkategori “sangat mandiri” adalah :

- a. Intensifikasi advokasi kepada stakeholder terkait yang menjadi penggiat anti narkoba dalam upaya P4GN di lingkungannya masing-masing.

- b. Komitmen dan dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan P4GN di lingkungannya masing-masing untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap ancaman Narkoba.
- c. Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan anti narkoba yang efektif, efisien dan tepat sasaran.
- d. Program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dilaksanakan sesuai dengan standar aktifitas dan *timeline* yang telah ditetapkan di awal tahun.
- e. Hubungan dan kerjasama yang baik BNNP NTT dan BNNK/Kota dengan stakeholder dan pemegang kebijakan.
- f. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di setiap komponen masyarakat.
- g. Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya :
 - a) Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan P4GN.
 - b) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN.
 - c) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 47 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Kabupaten Rote Ndao.
 - d) Surat Edaran Walikota Kupang Nomor: BAG.KESRA.001/354/I/2019, tanggal 11 Januari 2019 tentang Pelaksanaan P4GN di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
 - e) Surat Edaran Bupati Belu Nomor: BKBP-354/276/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Pelaksanaan P4GN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Selain itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat anti narkoba juga menghadapi beberapa kendala diantaranya :

- a) Pemahaman dan komitmen para stakeholder tentang P4GN belum memadai, dan masih beranggapan bahwa tugas P4GN hanya tugas BNN semata;
- b) Alokasi anggaran P4GN yang tersedia belum mengakomodir daerah kepulauan, sehingga program pemberdayaan anti narkoba hanya bisa menjangkau Kabupaten/Kota yang ada BNNKnya saja;
- c) Kesulitan dalam pelaksanaan monev program karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk biaya akomodasi ke Kabupaten sasaran. Monev hanya dilakukan via telepon, email, maupun media elektronik lainnya, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal (tidak semua stakeholder memberikan feed back, dan kendala sarana prasarana media (tidak mempunyai email/whatsapp);

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan jumlah instansi/lembaga yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dalam rangka advokasi kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.
- 2) Mendorong pemerintah daerah, lingkungan pendidikan, dunia usaha dan masyarakat agar melaksanakan upaya P4GN di lingkungannya melalui penyebaran informasi P4GN, deteksi dini dan pembentukan satgas P4GN.
- 3) Terus berupaya menginisiasi dan memotivasi para penggiat agar dapat melakukan kegiatan P4GN yang tidak membutuhkan biaya (seperti kampanye dan sosialisasi anti narkoba pada kegiatan-kegiatan yang sudah ada/insert).
- 4) Mendorong instansi/lembaga membentuk penggiat anti narkoba di lingkungannya masing-masing.

- 5) Meningkatkan peran instansi/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi aktif mendukung program P4GN.
- 6) Mengajukan dukungan penambahan anggaran untuk dapat mengintervensi wilayah rawan prioritas yang berada di luar Kota Kupang.

e. Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2024

Inovasi yang telah dilakukan oleh Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan indeks kemandirian partisipasi Lembaga selama tahun 2024 antara lain :

- 1) Cooperation/bekerjasama dengan Instansi/Lembaga Pendidikan dalam peningkatan dayatangkal remaja anti narkoba melalui integrasi materi pendidikan anti narkoba di sekolah.
- 2) Kolaborasi dengan komunitas pemuda dan komunitas Masyarakat dalam P4GN.
- 3) Membuat lomba-lomba kreatif BNN untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam P4GN.
- 4) Melakukan advokasi kepada stakeholder lingkungan swasta untuk support atau dukungan P4GN melalui sponsorship atau CSR.

4.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase penyala guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup

Defenisi operasional Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah Kualitas hidup adalah penilaian terhadap kesejahteraan hidupnya berdasarkan nilai-nilai pribadi yang meliputi kesehatan fisik, kepuasan psikologis, hubungan individu dengan sosial dan lingkungan yang mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari.

a. Capaian indikator kinerja

Hasil pengukuran capain Persentase Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup diukur dari

dengan nilai yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang tinggi dan sebaliknya Nilai yang rendah menunjukkan kualitas hidup yang rendah.

Indikator kinerja persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024 sebesar 68%, dengan realisasi 87.18% atau 128.2%, dapat disimpulkan Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup menunjukkan kualitas hidup yang tinggi. Tabel capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	87.18%	128.2 %

b. Metedo Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyala Guna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup serta Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun Sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Kualitas hidup diukur melalui indikator yang terdiri dari empat domain yaitu kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, hubungan sosial dan hubungan dengan lingkungan (WHOQOL-BREF, 2004).

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyala Guna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup serta Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun Sebelumnya**

📊 **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan**

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP NTT	68%	87.18 %	128.2%
2	BNN Kabupaten Belu	68 %	100%	147%
3	BNN Kota Kupang	68 %	100%	147%
4	BNN Kabupaten Rote Ndao	68 %	100%	147%

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase penyala guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran melebihi target yang telah ditetapkan atau disimpulkan bahwa Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup tahun 2024 BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup yang tinggi.

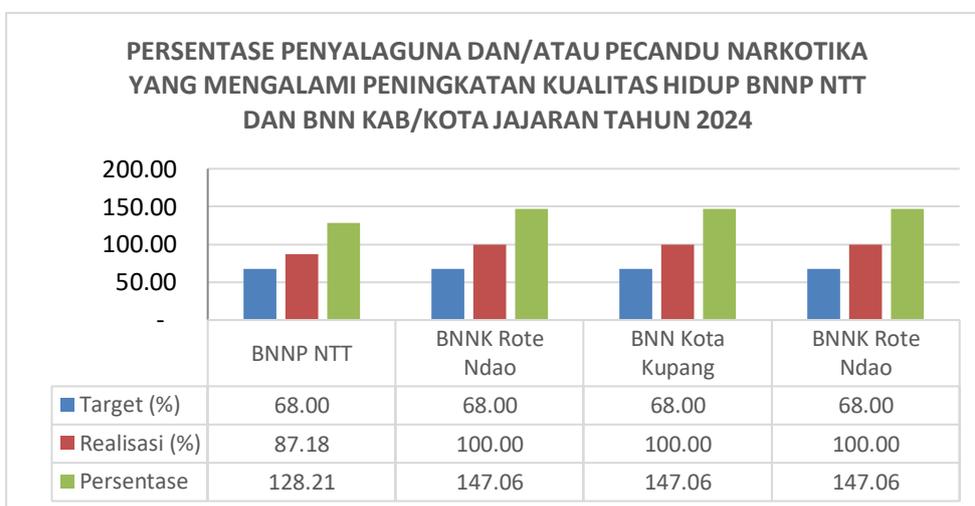
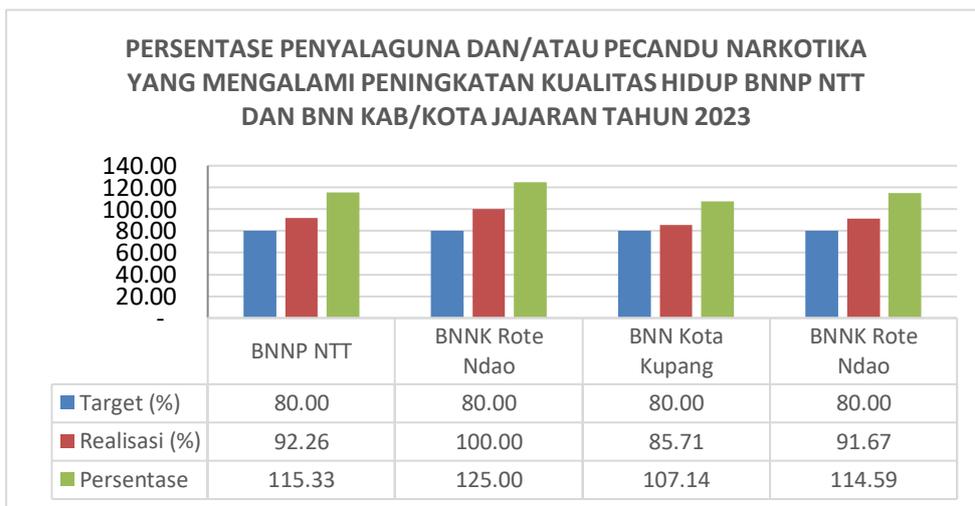
Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyala guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup :

Perhitungan Capaian :

% Capaian	:	68%	x 100% = 128.2 %
		87.18%	

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan data realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyala guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup Jajaran BNN provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran tahun 2023 dan tahun 2024.



Kedua grafik diatas menggambarkan capain realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyala guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran melebihi target yang telah ditetapkan atau dapat disimpulkan

bahwa Penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup yang tinggi.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan karena didukung Perencanaan dan Pelaksanaan Terhadap Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika di Klinik BNNP dan Klinik BNN Kab/Kota jajaran serta Stakeholder terkait yang ada di masyarakat yaitu IBM telah terlaksana dengan baik.

d. Permasalahan

- 1) Terdapat kendala menyesuaikan jadwal konseling dengan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.
- 2) Belum sesuai layanan yang diberikan dengan SOP dikarenakan pegawai belum mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.

e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

- 1) Penyebaran Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Sosialisasi program rehabilitasi rawat jalan dan program IBM kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan pencegahan dan penyebaran informasi narkotika di Wilayah Kabupaten dan kota agar masyarakat sadar untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.
- 2) Penilaian kualitas hidup dilakukan pada saat penerimaan awal klien dan sebelum dilakukannya terminasi layanan dengan menggunakan instrumen WHOQoL. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai apakah klien memperoleh peningkatan kualitas hidup setelah mengikuti layanan rehabilitasi.

f. Inovasi yang telah dilakukan selama Tahun 2024

Menyusun rencanan terapi yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas klien yang bersangkutan sehingga klien diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

5.

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Definisi operasional Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah petugas penyelenggara layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis.

a. Capaian indikator kinerja

Indikator kinerja Kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur target 10 orang. Untuk mendukung Indikator kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi melalui bimbingan teknis. Realisasi kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target sebesar 10 orang dengan capaian kinerja sebesar 10 orang atau 100%, sesuai dengan target Indikator kinerja Kegiatan yang ditetapkan.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 %

b. Metode Pengukuran dan Analisa Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih serta perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan dengan tahun sebelumnya

❖ Metode Pengukuran

Metode pengukuran realisasi target Indikator kinerja Kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah petugas penyelenggara layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran Tahun 2024. Agen Pemulihan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan setempat mendapatkan pembekalan yang akan dilakukan baik oleh BNNP/BNNK maupun instansi/lembaga terkait. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai narkoba dan

keterampilan AP untuk pelaksanaan kegiatan dan layanan IBM agar program IBM dapat dijalankan sesuai standar dan prosedur yang telah ditentukan. Peningkatan keterampilan AP dapat berupa pembekalan dalam kelas atau pendampingan langsung di lapangan. Di akhir pembekalan, AP akan melakukan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelaksanaan IBM di tingkat Desa/Kelurahan. Setelah RTL tersusun, BNNP/BNNK akan melakukan pendampingan terhadap implementasi RTL. Dalam penyusunan RTL oleh Tim AP, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan agar rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan secara efektif: Langkah 1: Analisa masalah yang terdiri dari analisa situasi, identifikasi masalah, penetapan prioritas masalah, dan faktor penyebab; Langkah 2: Perumusan tujuan, sasaran dan kebijakan PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT; Langkah 3: Pengambilan keputusan yang terdiri dari penelaahan alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan dan deskripsi kegiatan; Langkah 4: Pengawasan, pengendalian, penilaian dan metode yang digunakan; Langkah 5: Penguraian alternatif terpilih menjadi suatu rencana yang siap dilaksanakan

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih serta Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun Sebelumnya**

✚ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan**

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP NTT	10 Orang	10 Orang	100%
2	BNN Kabupaten Belu	10 Orang	10 Orang	100%
3	BNN Kota Kupang	10 Orang	10 Orang	100%

4	BNN Kabupaten Rote Ndao	10 Orang	10 Orang	100%
---	-------------------------	----------	----------	------

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator kinerja Kegiatan jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kabupaten/Kota Jajaran tahun 2024 tercapai sesuai target Indikator kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan atau 100 persen.

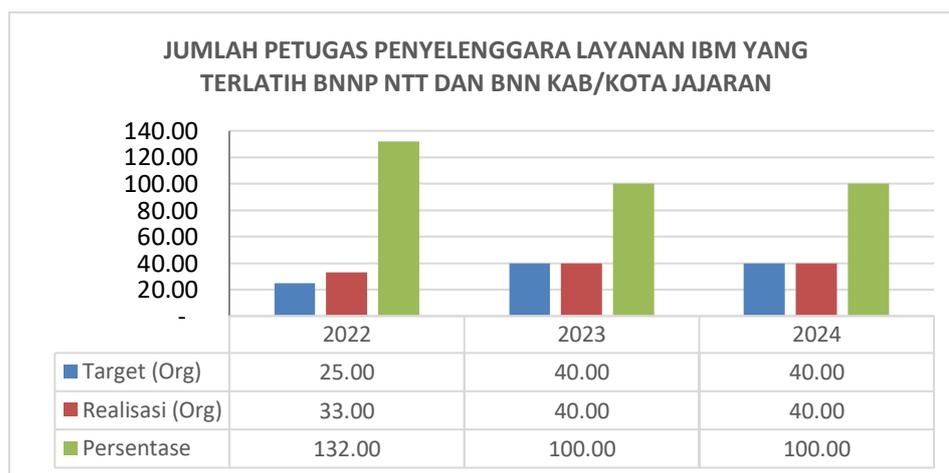
Adapun perhitungan realisasi kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tahun 2024 :

Perhitungan Capaian :

% Capaian	:	$\frac{10 \text{ Orang}}{10 \text{ Orang}}$	x 100% = 100 %
-----------	---	---	----------------

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun Sebelumnya

Data pembanding realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik diatas menggambarkan perbandingan capain realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun

sebelumnya. Pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan mencapai target atau sebesar 100 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan atau 132 persen.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan adalah Petugas IBM sudah mendapatkan Pelatihan telah mengimplementasikan rencana tindak lanjut secara efektif.

d. Permasalahan

- 1) Materi terlalu rumit dan pemberian materi terlalu padat, sehingga Peserta peningkatan kemampuan merasa kesulitan menyerap materi yang banyak dalam waktu 3 hari saja;
- 2) Pemberian materi kurang efektif dikarenakan tempat pelatihan yang kurang memadai;
- 3) Pemberian kompensasi bagi peserta peningkatan kemampuan dirasa belum sesuai, hanya terdiri dari uang transport, sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis lebih dari 8 jam perhari.

e. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Meningkatkan Sosialisasi program rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di Wilayah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Memetakan kembali lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) agar operasional.

6.

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Wilayah Provinsi

Defenisi operasional adalah Fasilitas lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan (SPM) milik Intansi Pemerintah yang operasional sebagai tempat rehabilitasi serta memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Wilayah Provinsi dan BNN Kab/Kota jajaran target Indikator kinerja Kegiatan masing-masing 1 lembaga. Untuk mendukung Indikator kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota jajaran melakukan kegiatan Layanan Klinik Pratama. Realisasi Indikator kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi NTT 1 lembaga dengan persentase capaian Indikator kinerja Kegiatan sebesar 100 persen, sesuai target Indikator kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus. Pada komponen identitas dan data

demografi lembaga berisi tentang data umum lembaga rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian lembaga rehabilitasi, jenis layanan yang diberikan, hingga metode layanan yang digunakan dalam proses rehabilitasi penyalagunaan narkoba. Pada komponen penilaian umum terdapat 5 sub komponen yang menjadi dasar penilaian, yaitu kelembagaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Sedangkan pada komponen penilaian khusus dibagi menjadi dua jenis layanan yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

📊 **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan**

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNN Provinsi NTT	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2	BNN Kabupaten Belu	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
3	BNN Kota Kupang	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
4	BNN Kabupaten Rote Ndao	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran, masing – masing mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 100 persen, sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di Wilayah Provinsi :

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100\% = 100\%$$

✚ Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi dan jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional BNN Kabupaten/Kota Jajaran tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 :



Grafik diatas menggambarkan perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja

Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional BNN Kabupaten/Kota jajaran mencapai 100 persen, sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Perhitungan Capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional BNN Kab/Kota jajaran tahun 2024:

% Capaian	:	$\frac{4 \text{ Lembaga}}{4 \text{ Lembaga}}$	x 100% =	100 %
------------------	---	---	----------	-------

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan adalah lembaga rehabilitasi yang dinilai sudah memenuhi standar penilaian melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan/bimtek dan dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana layanan lembaga rehabilitasi.

7.	<p style="text-align: center; margin: 0;">Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi</p>
----	---

Defenisi operasional Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (low

threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi target 8 unit. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota jajaran melakukan kegiatan Pembentukan unit IBM. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional sebesar 8 unit dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% , sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	8 unit	8 unit	100%

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan dengan pengukuran kualitas hidup kepada setiap klien dengan menggunakan formulir WHO-QOL dan URICA. Peningkatan kualitas hidup berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrument rapor pemulihan mantan penyalah guna dan WHO-QoL. Dalam WHO-QoL mengukur 4 (empat) domain kehidupan mantan penyalah guna, yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Tujuan dilaksanakan pengisian WHO-QoL adalah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap mantan penyalahguna, yang dibandingkan pada awal dan akhir layanan pasca rehabilitasi.

- ❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

✚ Analisi Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP NTT	8 Unit	8 Unit	100%
2	BNNK Belu	2 Unit	2 Unit	100%
3	BNN Kota Kupang	2 Unit	2 Unit	100%
4	BNNK Rote Ndao	2 Unit	2 Unit	100%

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kab/Kota Jajaran , masing – masing mencapai sebesar 100 persen, sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

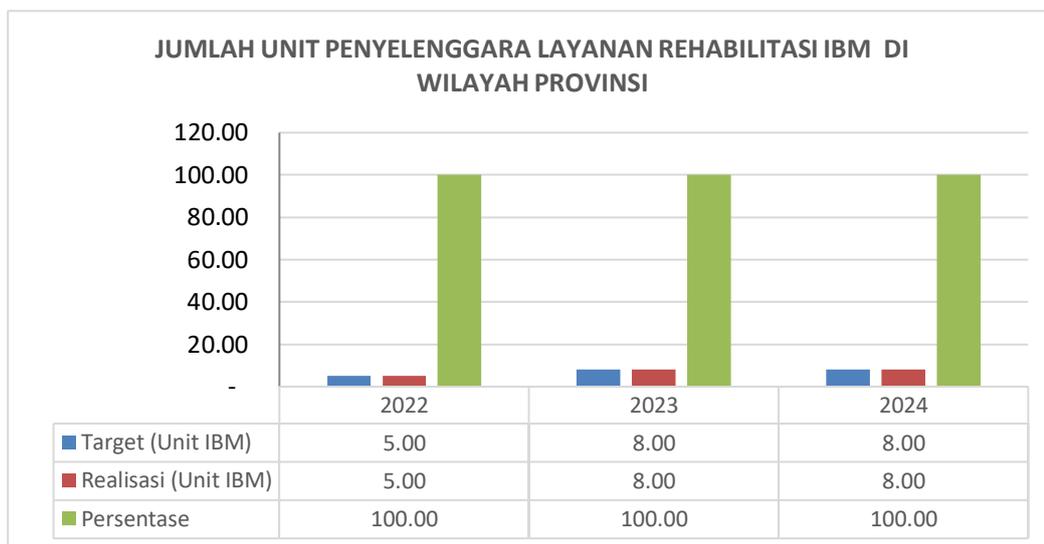
Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi.

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{8 \text{ Unit}}{8 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

✚ Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik diatas menggambarkan perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi tahun 2022 s.d tahun 2024 mencapai 100 persen, sesuai dari target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

- 1) Kerjasama yang terjalin dengan baik dengan stakeholder turut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna.
- 2) Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.
- 3) Komitmen yang tinggi dari para penyelenggara program rehabilitasi milik instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

- 1) Pemetaan kembali lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitas) agar operasional.

- 2) Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba.
- 3) Koordinasi dengan pembina teknis untuk meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional.

8.

Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN

Defenisi Operasional Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi.

a. Capaian indikator kinerja

Indikator kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN target 3.77 Indeks dengan realisasi 3.77 Indeks atau 100 Persen, sesuai target kinerja yang ditetapkan. Tabel realisasi Indikator kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tahun 2024 sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.77 Indeks	3.77 Indeks	100 %

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Penerima Layanan pada Fasilitas Rehabilitasi BNN tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ Metode Pengukuran

Metode pengukuran indikator “Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi” Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi

dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrument kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah.

- ❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi Narkotika tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

Analisi Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel realisasi Indikator kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BNN Kabupaten/Kota Jajaran tahun 2024 :

No	Satker	Target	Realisasi	% Realisasi
1	BNNP NTT	3.77 Indeks	3.77 Indeks	100%
2	BNNK Belu	3.06 Indeks	3.8 Indeks	124.2%
3	BNN Kota Kupang	2.60 Indeks	3.55 Indeks	136.5%
4	BNNK Rote Ndao	3.77 Indeks	3.91 Indeks	103.7%

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai target yang ditetapkan sedangkan BNN Kabupaten/Kota Jajaran realisasi Indikator Kinerja Kegiatan melebihi target yang ditetapkan.

Adapun perhitungan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi Narkotika

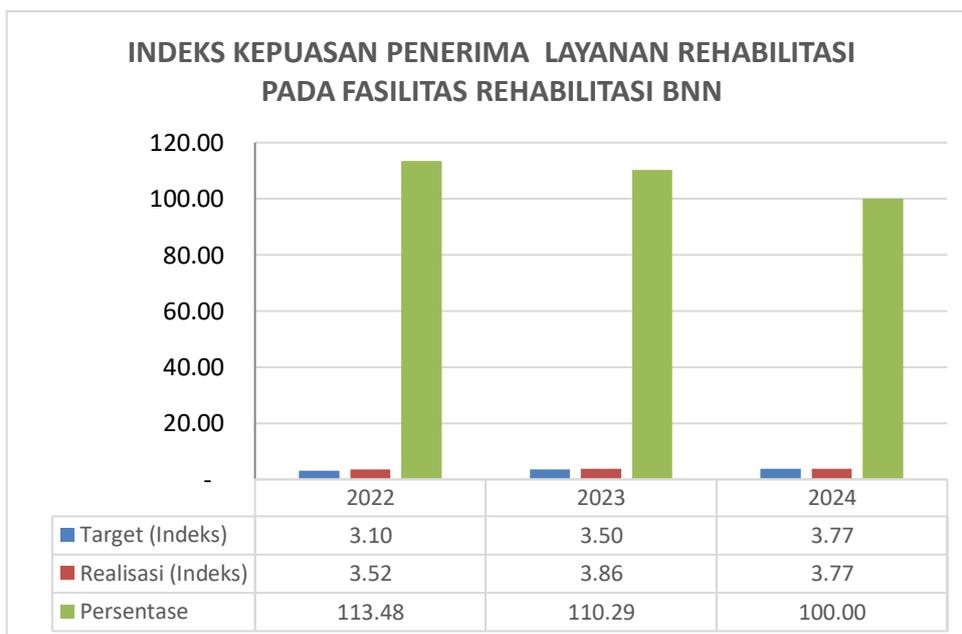
Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{3.77 \text{ Indeks}}{3.77 \text{ Indeks}} \times 100\% = 100 \%$$

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.

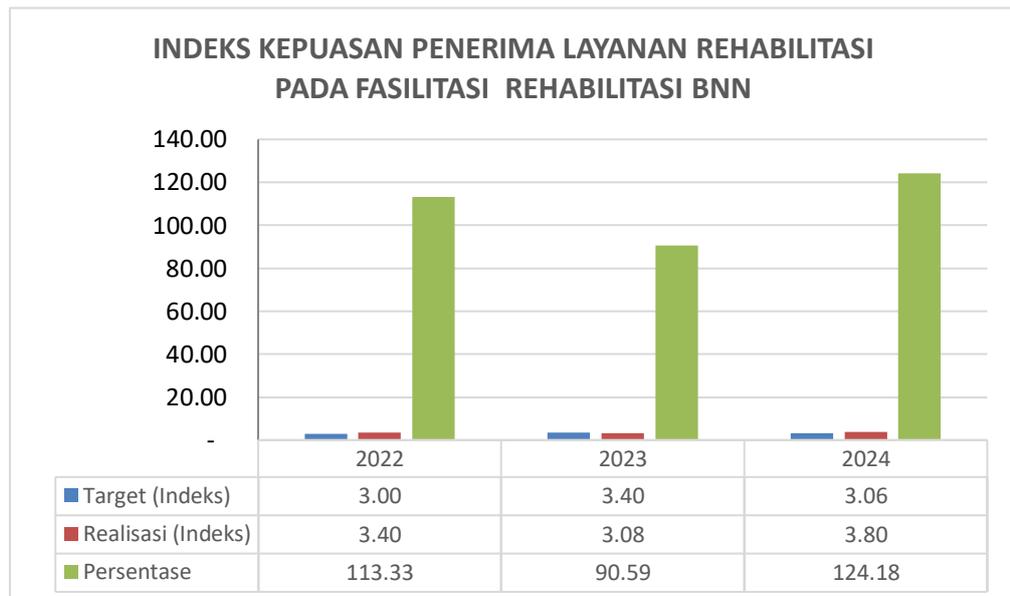
1. BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 dan 2023 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara

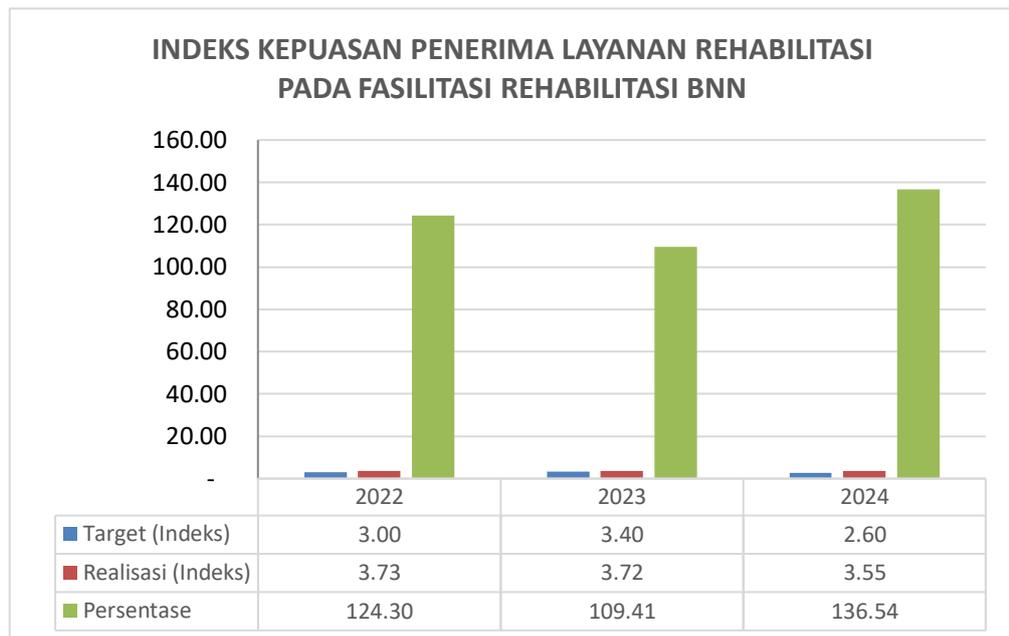
Timor melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 113.48 persen dan 110.29 persen, sedangkan tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan atau 100 persen.

2. BNN Kabupaten Belu



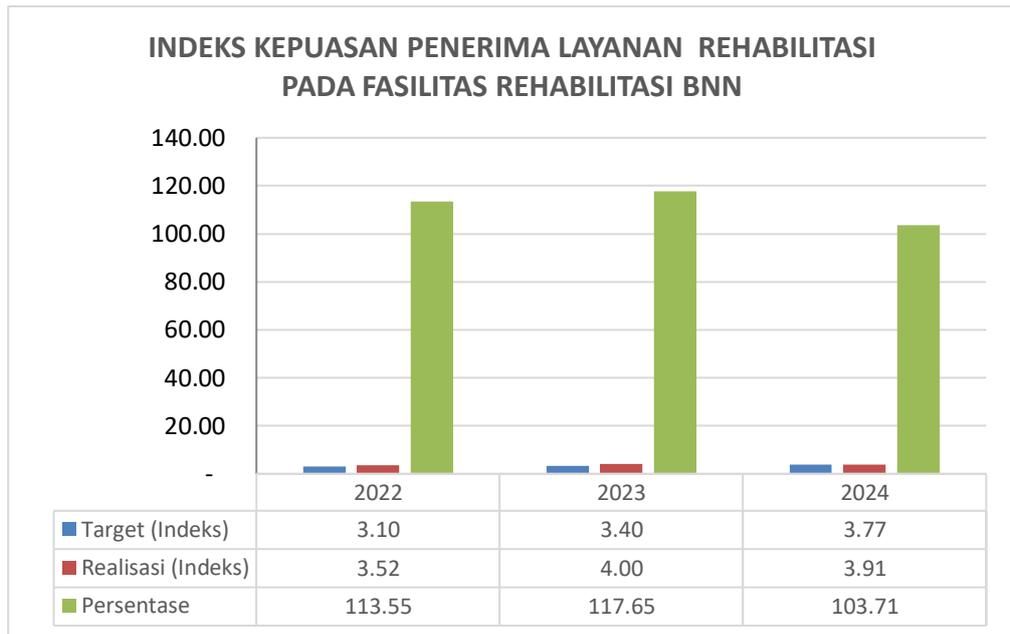
Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Kabupaten Belu melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 113.33 persen dan 124.18 persen, sedangkan tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan atau 90.59 persen.

3. BNN Kota Kupang



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 s.d 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Kota Kupang melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 124.30 persen, 109.41 persen dan 136.54 persen.

4. BNN Kabupaten Rote Ndao



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 s.d 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Kota Kupang melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 113.55 persen, 117.65 persen dan 103.71 persen.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Informasi mengenai layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi NTT sudah di respon oleh masyarakat serta Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTT dengan cara secara aktif melakukan sosialisasi.

Defenisi operasional jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 adalah jumlah berkas perkara penyelidikan dan penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika yang terungkap dan terselesaikan sampai dengan P-21 dan tahap II (penyerahan berkas perkara dan barang bukti) ke JPU.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21, dengan target sebanyak 3 berkas perkara. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 mencapai target 4 berkas perkara atau 133 persen. Adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 berkas Perkara	4 berkas perkara	133 %

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Metode Pengukuran capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diukur berdasarkan proses pengungkapan kasus yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas perkara (tahap I) ke JPU dan P-21 serta tahap II (penyerahan berkas perkara dan barang bukti) ke JPU.

- ❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

✚ Analisa Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun 2024 :

No	Satker	Target	Realisasi	% Realisasi
1	BNNP NTT	3 Berkas Perkara	4 Berkas Perkara	133 %

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun 2024 melebihi i target kinerja yang ditetapkan atau 133 persen.

Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun 2024.

Perhitungan Capaian :

$\% \text{ Capaian} \quad : \quad \frac{3 \text{ Berkas Perkara}}{4 \text{ Berkas Perkara}} \quad \times 100\% = \quad 133 \%$
--

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data pembandingan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik di atas menggambarkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan atau 133.33 persen, pada tahun 2023 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21, sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan atau 100 persen sedangkan pada Tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21, tidak mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan atau 0 persen.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

- 1) Letak geografis wilayah NTT, merupakan daerah kepulauan sehingga untuk mendapatkan kepastian informasi terhadap suatu target (TO) membutuhkan waktu beberapa hari dan anggaran yang memadai untuk sampai di daerah atau TKP tersebut.
- 2) Peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi NTT, dikategorikan masih rendah karena keadaan kehidupan ekonomi masyarakat, dimana harga narkoba untuk wilayah NTT sangat mahal (2,7 juta/gram), sehingga daya beli masyarakat rendah, dan yang mampu membeli hanya kalangan ekonomi menengah keatas yang berduit saja yang mampu membelinya, sedangkan masyarakat lokal kebanyakan mengkonsumsi minuman lokal (alkoho) yang berupa Sopi dan Moke.
- 3) Tidak didukung alat *narco test* dan alat test urine di bidang pemberantasan sehingga sulit untuk dilakukan pendeteksian awal pada saat operasi malam dan penangkapan.
- 4) Tidak tersedia *spy cam* (kamera tersembunyi) yang digunakan pada saat pemeriksaan untuk merekam semua pembicaraan tersangka pada saat diperiksa.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam upaya meningkatkan jumlah capaian target berupa berkas perkara tindak pidana narkoba, maka BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan rencana aksi dan strategi kedepan sebagai berikut :

- 1) Harus adanya peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan yang mendukung kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba, khususnya ketika peredaran gelap narkoba yang terjadi di laut.
- 2) Harus adanya peningkatan kemampuan intelijen penyelidikan dan penyidik untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah NTT, khususnya penyelidikan intelijen yang berbasis IT.
- 3) Adanya peningkatan sistem koordinasi dengan instansi lain terkait jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah NTT.

Defenisi operasional Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang melarikan diri, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

a. Capaian indikator kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan dengan target 100 indeks. Capaian indikator kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 terhadap pelaksanaan keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan sebesar 100 indeks atau 100 %, dengan rincian capaian sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai tingkat keamanan , ketertiban dan kesehatan tahanan	100 indeks	100 indeks	100%

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang melarikan diri, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. Maka penghitungan indikator kinerja adalah: a = jumlah tahanan yang melarikan diri b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas. Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100.

Dengan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100 \% \right] \times 100$$

- ❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

Analisi Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Tingkat Keaamnan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan tahun 2024 :

:

NO	Kasus	Jml Tahanan	Kesehatan	Nilai
1	Tahanan Masuk	4	100	100
2	Tahanan Keluar	4	100	100
	Nilai	100	100	100 Indeks

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dengan capaian 100 Indeks atau sebesar 100 persen mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun perhitungan realisasi capaian kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan tahun 2024:

Perhitungan Capaian :

% Capaian	:	$\frac{100 \text{ indeks}}{100 \text{ indeks}}$	$\times 100\% = 100\%$
-----------	---	---	------------------------

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya . Pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 100 persen, sedangkan tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan nihil disebabkan tidak ada pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan / kegagalan :

1. Adanya pembagian tugas yang merata berupa piket jaga tahanan untuk semua anggota personil BNNP NTT untuk menjaga tahanan.
2. Kekompakan, kebersamaan dan semangat kerja yang tinggi semua personil dalam menjaga dan mengawasi tahanan.
3. Adanya kedisiplinan dari tahanan untuk mau mentaati semua peraturan di rutan BNNP NTT tersebut.

4. Adanya olah raga rutin setiap pagi bagi para tahanan dan adanya pengecekan kesehatan tahanan secara rutin.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Rencana aksi dan strategi untuk meningkatkan nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah :

- 1) Pengadaan sarana prasarana, dan perlengkapan guna mendukung semua kegiatan pelaksanaan pengawasan tahanan.
- 2) Peningkatan kemampuan personil dalam Penyidikan Jaringan Peredaran Narkoba dan pengawasan tahanan melalui pembinaan, Pendidikan dan latihan khusus pengawasan tahanan.

11.

Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika

Defenisi operasional nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika, adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non narkotika.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Target Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan barang bukti dan non barang bukti dengan target 100 indeks. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan barang bukti dan non barang bukti 100 indeks atau 100 persen, sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, dengan rincian nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks	100 indeks	100%

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Metode pengukuran dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan nonnarkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$. $a_1 =$ untuk barang bukti 1 $a_2 =$ untuk barang bukti 2, dst. Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Dengan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

Dengan $y =$ jumlah BA (penitipan), dan asumsi : jumlah BA penitipan = Jumlah BA pengeluaran.

- ❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

📌 Analisa Realisasi Kinerja

Tabel realisasi kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti dan non narkotika tahun 2024 :

NO	Barang bukti	Barang bukti masuk	Barang bukti dimusnahkan & Untuk keperluan lain (UU 35 Tahun 2009)
1	1,7507Gram (Shabu)	Februari 2024	1,7507 Gram
2	2,1520 Gram (Ganja)	September 2024	2,1520 Gram
3	529 Gram (Ganja)	September 2024	529 Gram

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika dengan capaian 100 Indeks atau sebesar 100 persen, sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

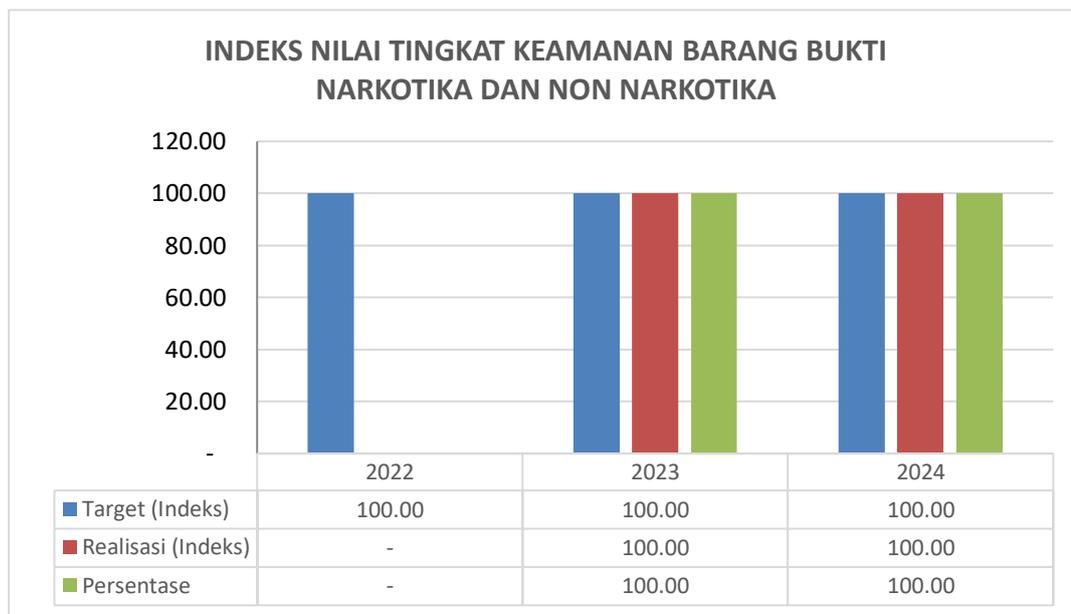
Adapun perhitungan realisasi capaian kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika tahun 2024.

Perhitungan Capaian :

% Capaian	:	100 indeks	x100% =	100 %
		100 indeks		

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 dan 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika, sesuai target Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 100 persen, sedangkan tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika nihil disebabkan tidak ada pengungkapan kasus tindak pidana narkotika.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Adanya upaya pribadi dari anggota untuk keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.
2. Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap pihak instansi-instansi yang menangani pemeriksaan lab terhadap barang bukti narkotika dan non narkotika, agar keamanan terhadap barang bukti tetap terjaga dan terjamin.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Untuk meningkatkan keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika akan melakukan rencana aksi dan strategi adalah:

1. Pengadaan tempat khusus penyimpanan BB narkotika dan non narkotika.
2. Pengadaan neraca (alat timbang) BB narkotika dan non narkotika.
3. Harus ada petugas khusus yang mengurus dan mengamankan BB, baik itu narkotika maupun non narkotika.

12.

Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Kinerja Anggaran BNN

Defenisi operasional Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). NKA digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.

a. Capaian indikator kinerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan target 89 Indeks. Sesuai dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 94.50 Indeks data *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan Tahun 2024 dengan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN sebesar 106.2 persen, melebihi capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan atau berkategori “Sangat Baik”.

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 :

No	Indikator	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 indeks	94.50 indeks	103.22%	Sangat Baik

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Rumus untuk menghitung NKA adalah $NKA = 60\% \times EKA + 40\% \times IKPA$.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga, eselon I /program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik;
- 2) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;
- 3) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;
- 4) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan;
- 5) Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

✚ **Analisi Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan**

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN. Nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur data aplikasi smart Kemenkeu Tahun 2024:

No	Satker	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran (Indeks)
1	BNNP NTT	99.43	89.56	94.50

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Anggaran Nilai Kinerja Anggaran BNN melebihi target kinerja yang ditetapkan 94.50 indeks dengan kategori nilai kinerja anggaran “ **Sangat Baik** “.

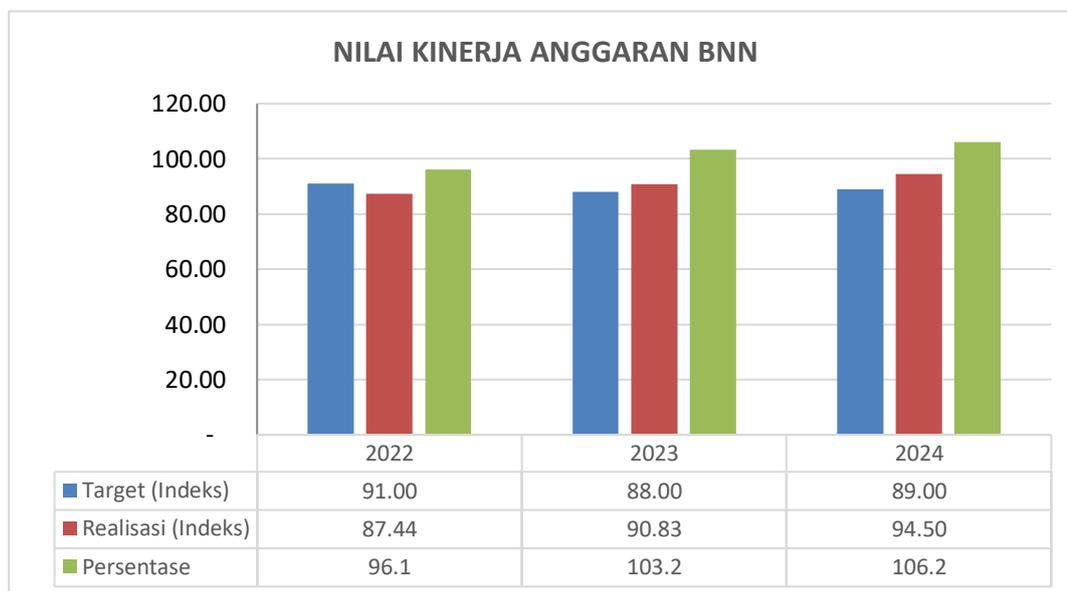
Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Anggaran Nilai Kinerja Anggaran BNN Tahun 2024.

Perhitungan Capaian :

$\% \text{ Capaian} \quad : \quad \frac{89 \text{ indeks}}{94.50 \text{ indeks}} \quad \times 100\% = 106.2 \%$

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN, BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 nilai kinerja anggaran BNN 90.83 indeks berkategori “**Sangat Baik**”; dan Tahun 2024 nilai kinerja anggaran BNN 94.50 indeks berkategori “**Sangat Baik**” melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2022 nilai kinerja anggaran BNN 87.44 indeks berkategori “**Baik**” dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN yang ditetapkan.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran BNN adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

13.	Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN Mencapai Target
------------	---

Defenisi operasional jumlah BNN kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN mencapai target adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kab/Kota di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, NKA yang mencapai target. .

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN mencapai target sesuai dengan realisasi Nilai Kinerja Anggaran aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) tahun 2024 :

- 1). BNN Kabupaten Belu target NKA BNN 87 Indeks realisasi NKA BNN 99.95 indeks atau 114.9 persen, berkategori NKA “ **Sangat Baik**”;
- 2). BNN Kota Kupang target NKA BNN 87 Indeks realisasi NKA BNN 98.98 indeks atau 118.2 persen, berkategori NKA “ **Sangat Baik**”;

dan 3). BNN Kabupaten Rote Ndao target NKA BNN 80 Indeks realisasi NKA BNN 94.57 indeks atau 118.2 persen, berkategori NKA “ **Sangat Baik**”. Dapat disimpulkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN mencapai target, dengan target 1 BNN Kab/Kota realisasi 3 BNN Kab/Kota atau sebesar 300 persen, melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan.

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja mencapai target sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%	Kategori NKA
1	BNNK Belu	87 indeks	99.95 indeks	114.9%	Sangat Baik
2	BNN Kota Kupang	87 indeks	98.98 indeks	118.2%	Sangat Baik
3	BNNK Rote Ndao	80 indeks	94.57 indeks	118.2%	Sangat Baik

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN mencapai target tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Rumus untuk menghitung NKA adalah $NKA = 60\% \times EKA + 40\% \times IKPA$.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga, eselon I /program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik;
- 2) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;

- 3) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;
- 4) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan;
- 5) Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

📊 **Analisi Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan**

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN, BNN Kab/Kota Jajaran Tahun 2024:

No	Satker	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran (Indeks)
1	BNNK Belu	100	99.90	99.95
2	BNN Kota Kupang	100	97.96	98.98
3	BNNK Rote Ndao	96.25	92.88	94.57

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN, dengan realisasi NKA 3 BNN Kab/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai target Nilai Kinerja Anggaran.

Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan jumlah BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN mencapai target Tahun 2024.

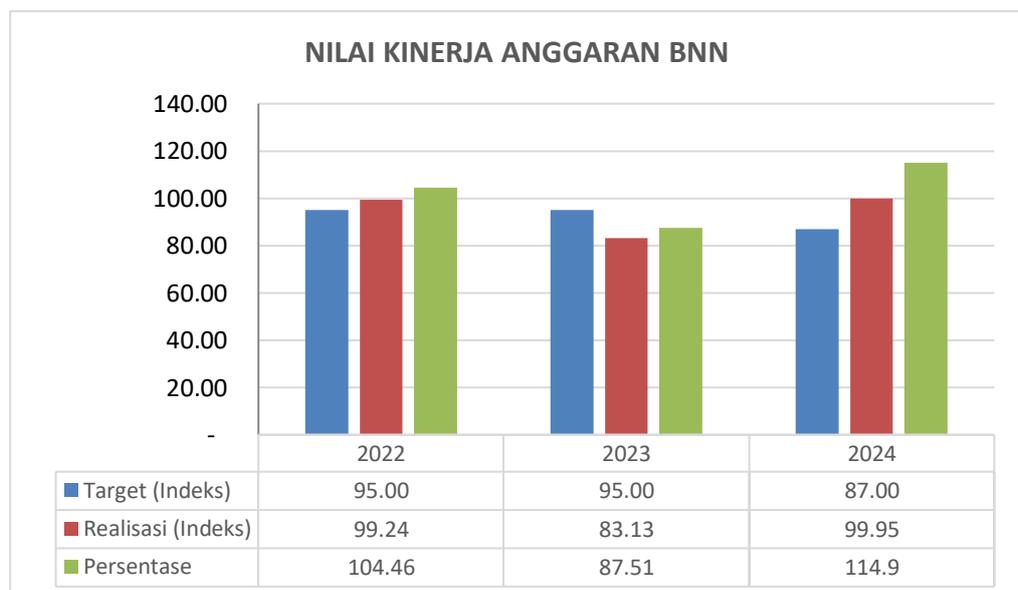
Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{1 \text{ BNN Kab/Kota}}{3 \text{ BNN Kab/Kota}} \times 100\% = 300 \%$$

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Berikut disajikan data perbandingan realisasi Kinerja jumlah BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran BNN mencapai target tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.

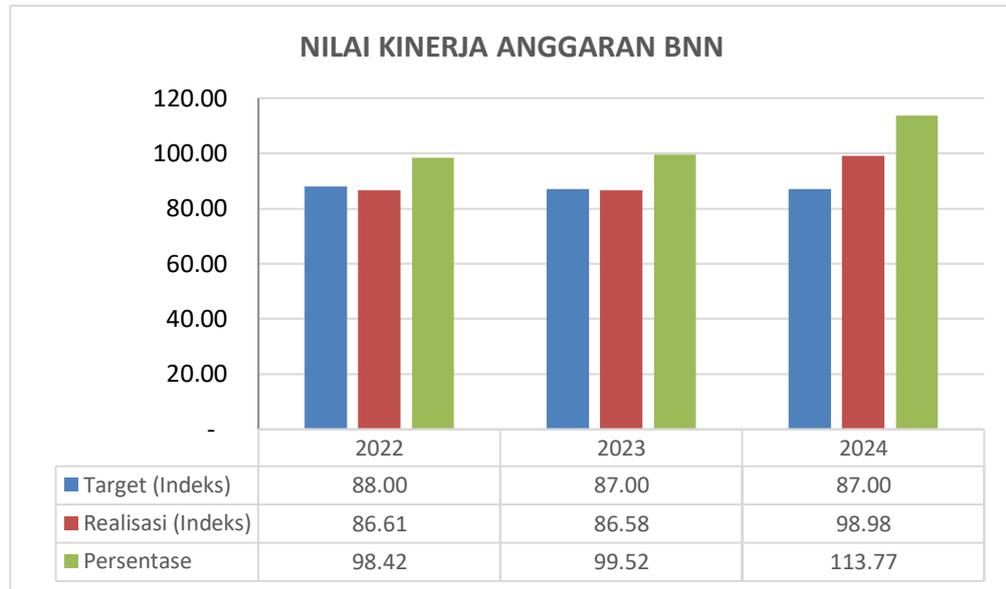
1. BNN Kabupaten Belu



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN, BNN Kabupaten Belu Tahun 2022 nilai kinerja anggaran BNN 99.24 indeks berkategori **“Sangat Baik”**; dan Tahun 2024 nilai kinerja anggaran BNN 99,95 indeks berkategori **“Sangat Baik”** melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai

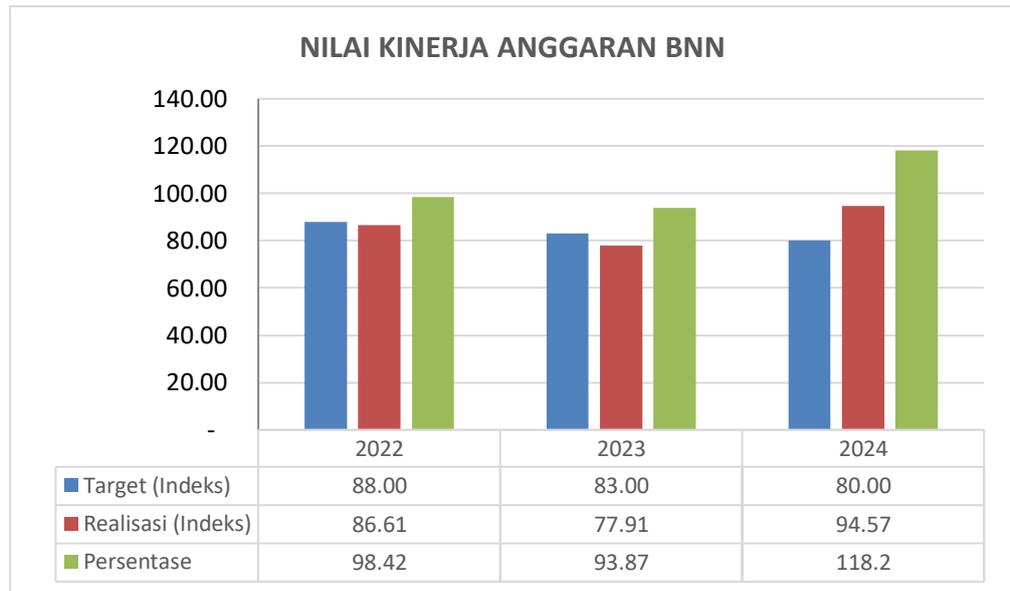
Kinerja Anggaran BNN yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2023 nilai kinerja anggaran BNN 83.13 indeks berkategori “ **Baik**” dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN yang ditetapkan.

2. BNN Kota Kupang



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN, BNN Kota Kupang Tahun 2024 nilai kinerja anggaran BNN 98.98 indeks berkategori “**Sangat Baik**”; melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2022 nilai kinerja anggaran BNN 86.61 indeks berkategori “ **Baik**” dan Tahun 2023 nilai kinerja anggaran BNN 86.58 indeks berkategori “ **Baik**” dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN yang ditetapkan.

3. BNN Kabupaten Rote Ndao



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN, BNN Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 nilai kinerja anggaran BNN 94.57 indeks berkategori “**Sangat Baik**”; melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2022 nilai kinerja anggaran BNN 86.61 indeks berkategori “**Baik**” dan Tahun 2023 nilai kinerja anggaran BNN 77.91 indeks berkategori “**Baik**” dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN yang ditetapkan.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Faktor kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran disebabkan :

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran terutama Adanya deviasi hal III DIPA tidak mencapai target.
- 2) Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP tidak mencapai target.

- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output tidak mencapai target.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran dengan memperhatikan nilai deviasi hal III DIPA.
- 3) Meningkatkan Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagiahan dan Pengelolaan UP dan TUP.
- 4) Meningkatkan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output.
- 5) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

14.

Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Defenisi operasional Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Satuan Kerja.

a. Capaian indikator kinerja

Capain Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 dengan target 94.65 Indeks . Sesuai dengan realisasi aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, IKPA BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 89.58 Indeks berkategori “**Baik**” dengan persentase capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 94.6 persen, dibawah target Indikator

Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan. Data Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA.2024 :

No	Indikator	Target	Realisasi	%	Kategori IKPA
1	Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94.65 indeks	89.56 indeks	94.6%	Baik

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran. Ada 3 (tiga) aspek/sisi yang diukur yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran (20%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%).

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

📊 **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan**

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur (data IKPA Kemenkeu Tahun 2024).

No	Satker	Indikator Pelaksanaan Anggaran			Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
1	BNNP NTT	79.45	92.32	99.47	89.56	100 %	89.56

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 89.56 Indeks berkategori **“Baik”** dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan atau 94.6 persen.

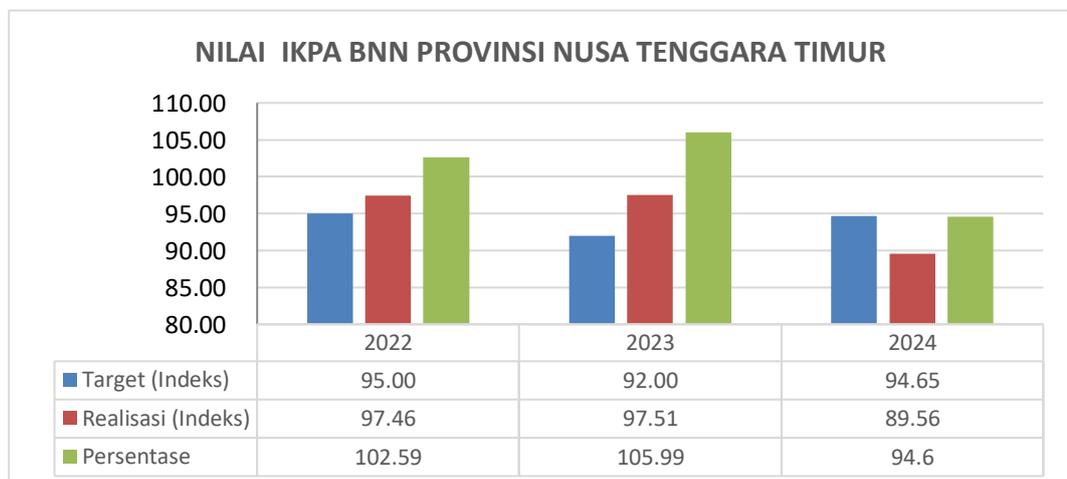
Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA)) Tahun 2024.

Perhitungan Capaian :

	94.65 indeks		x 100% = 94.6 %
% Capaian	:	89.56 indeks	

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nilai IKPA 97.46 indeks berkategori **“Sangat Baik”**; dan Tahun

2023 Nilai IKPA 97.51 indeks berkategori “**Sangat Baik**” melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2023 Nilai IKPA 89.56 indeks berkategori “ **Baik**” dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan.

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran

Faktor Keberhasilan : Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Faktor Kegagalan : Perencanaan Anggaran terutama pada belanja pegawai tidak direncanakan sesuai pagu anggaran belanja pegawai sehingga menyebabkan Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran khususnya nilai devisiasi hal III dipa tidak mencapai target dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran (nilai penyerapan anggaran tidak mencapai target).

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai kinerja anggaran BNN, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program sesuai rencana penarikan dana pada halaman III Dipa yang telah ditetapkan.

Defenisi operasional Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi yang mencapai target.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 3 BNN Kab/Kota, dengan rincian realisasi Nilai IKPA BNN Kab/Kota Jajaran sebagai berikut : 1). BNN Kabupaten Belu target Nilai IKPA 95 Indeks realisasi Nilai IKPA 99.90 indeks atau 105.5 persen, berkategori nilai IKPA “ **sangat baik** ” melebihi target Nilai IKPA yang telah ditetapkan ; 2). BNN Kota Kupang target Nilai IKPA 97.39 Indeks realisasi Nilai IKPA 97.96 indeks atau 100.6 persen, berkategori Nilai IKP “ **sangat baik** ” melebihi target Nilai IKPA yang telah ditetapkan ; dan 3). BNN Kabupaten Rote Ndao target Nilai IKPA 97.33 Indeks realisasi Nilai IKPA 92.88 atau 95.4 persen berkategori Nilai IKPA “ **baik** ” dibawah target Nilai IKPA yang telah ditetapkan. Sesuai dengan realisasi Nilai Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Keuangan, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target adalah 2 BNN Kab/Kota Jajaran atau 66.7%, dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target yang telah ditetapkan.

Data target dan realisasi capaian kinerja jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	%	Kategori IKPA
1	BNNK Belu	95 indeks	99.90 indeks	105.5%	Sangat Baik
2	BNN Kota Kupang	97.39 indeks	97.96 indeks	100.6%	Sangat Baik
3	BNNK Rote Ndao	97.33 indeks	92.88 indeks	95.4%	Baik

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan IKPA mencapai Target tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran. Ada 3 (tiga) aspek/sisi yang diukur yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran (20%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%).

- ❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target tahun 2023 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan a dengan Tahun sebelumnya**

Analisi Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kab/Kota Jajaran di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (data IKPA Kemenkeu Tahun 2024):

No	Satker	Indikator Pelaksanaan Anggaran			Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
1	BNNK Belu	100	99.75	100	99.90	100%	99.90
2	BNN Kota Kupang	94.56	99.17	100	97.96	100%	97.96
3	BNNK Rote Ndao	90.39	99.84	94.44	96.50	80%	92.88

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Belu dan BNN Kota Kupang melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan, dengan kategori nilai IKPA kedua BNN Kab/Kota tersebut “ **sangat baik** “. Sedangkan realisasi kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Rote Ndao dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan, dengan kategori nilai IKPA “ **baik** “.

Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target Tahun 2024.

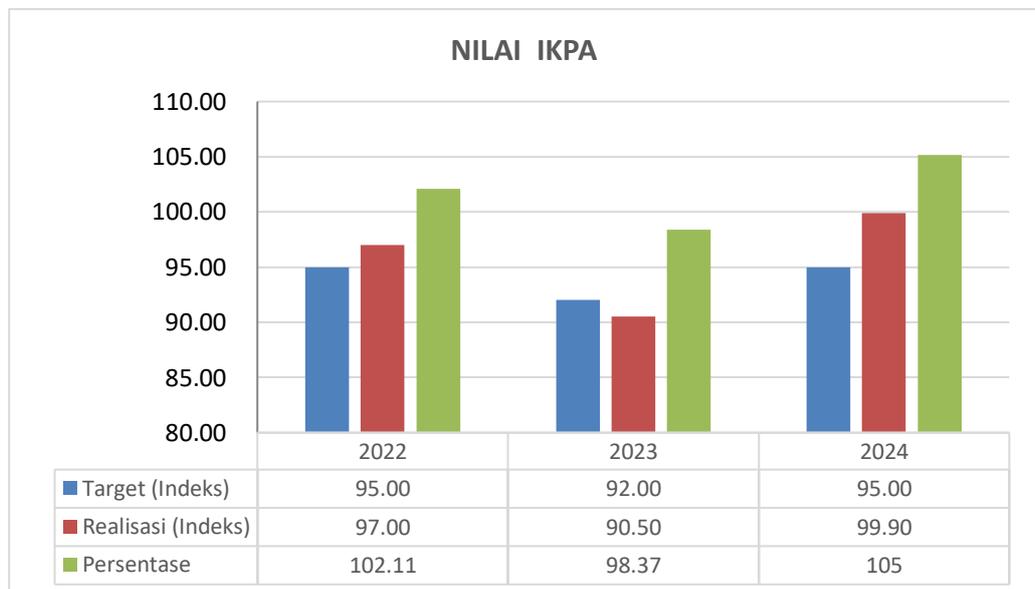
Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{3 \text{ BNN Kab/Kota}}{2 \text{ BNN Kab/Kota}} \times 100\% = 66.70 \%$$

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) masing-masing BNN Kab/Kota Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.

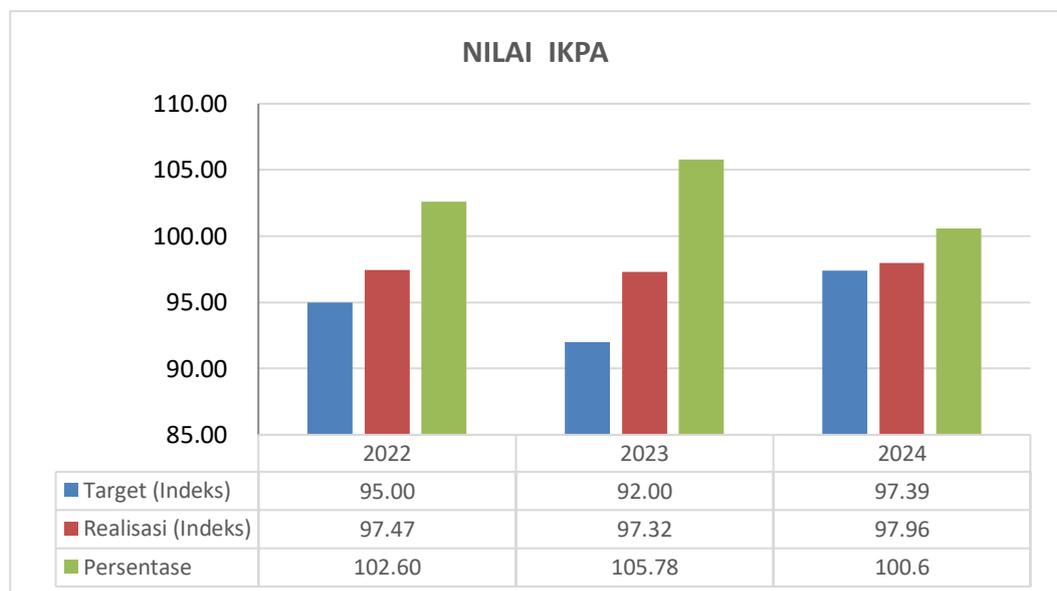
1. BNN Kabupaten Belu



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Belu Tahun 2024 Nilai IKPA 99.90 indeks berkategori “**Sangat Baik**”; melebihi dari target Indikator

Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2023 Nilai IKPA 90.50 indeks berkategori “ **Baik**” dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan dan Tahun 2022 Nilai IKPA 97 indeks berkategori “ **Sangat Baik**” melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan.

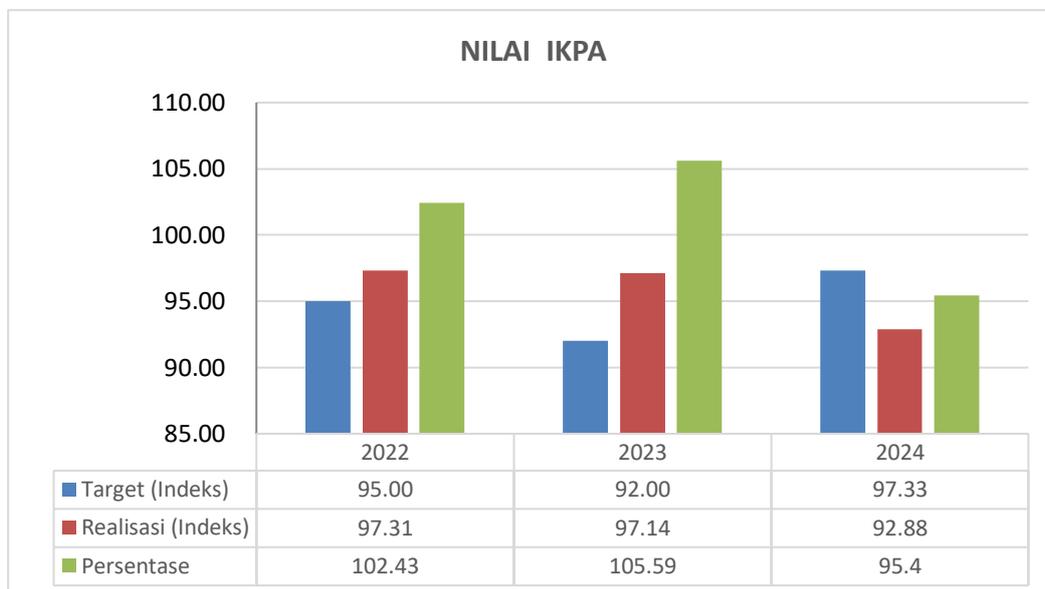
2. BNN Kota Kupang



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Kupang Tahun 2024 Nilai IKPA 97.96 indeks berkategori “**Sangat Baik**”; melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2023 Nilai IKPA 97.32 indeks berkategori “**Sangat Baik**”; melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan dan Tahun 2022 Nilai IKPA 97.47 indeks berkategori “**Sangat Baik**” melebihi dari target

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan.

3. BNN Kabupaten Rote Ndao



Grafik di atas menggambarkan perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nilai IKPA 92.88 indeks berkategori “**Baik**”; dibawah target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan sedangkan Tahun 2023 Nilai IKPA 97.14 indeks berkategori “**Sangat Baik**” melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan dan Tahun 2022 Nilai IKPA 97.31 indeks berkategori “**Sangat Baik**” melebihi dari target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan.

b. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target Tahun 2024:

Perhitungan:

Realisasi:	$\frac{3 \text{ Kabupaten/Kota}}{2 \text{ Kabupaten/Kota}}$	$\times 100\% = 66.7\%$
------------	---	-------------------------

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor keberhasilan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 2) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.

Faktor kegagalan pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran disebabkan :

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran terutama Adanya deviasi hal III DIPA tidak mencapai target.
- 2) Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagiahan dan Pengelolaan UP dan TUP tidak mencapai target.
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output tidak mencapai target.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

Dalam usaha meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran , maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran dengan memperhatikan nilai deviasi hal III DIPA.
- 3) Meningkatkan Kuantitas Pelaksanaan Anggaran pada Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP.
- 4) Meningkatkan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada capaian output.

16.

Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal

Defenisi operasional nilai zona adalah predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajaran mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capain Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal tahun 2023 dengan target 75 Indeks . Sesuai dengan penilaian internal dari Inpektur Utama BNN capaian Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 68.21 Indeks dengan persentase capaian kinerja sebesar 90.9 %, tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Data Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal TA.2024 :

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 indeks	68.21 indeks	90.9%

b. Metode Pengukuran dan Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

❖ **Metode Pengukuran**

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal adalah dilihat dari 3 aspek yaitu Pemenuhan (30%), Reform (30%) dan Hasil (40%).

❖ **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal tahun 2024 serta perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya**

📊 **Analisis Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan**

Tabel realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal (data capaian indikator kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal BNNP Hasil Penilaian Internal Tahun 2024).

No	Satker	Hasil Penilaian Tim Penilai Internal		Nilai ZI
		Pengungkit	Hasil	
1	BNNP NTT	32.72	35.49	68.21

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan Nilai Zona Integritas 68.21 dari target Nilai Zona Integritas 75 Indeks, dibawah target kinerja yang ditetapkan.

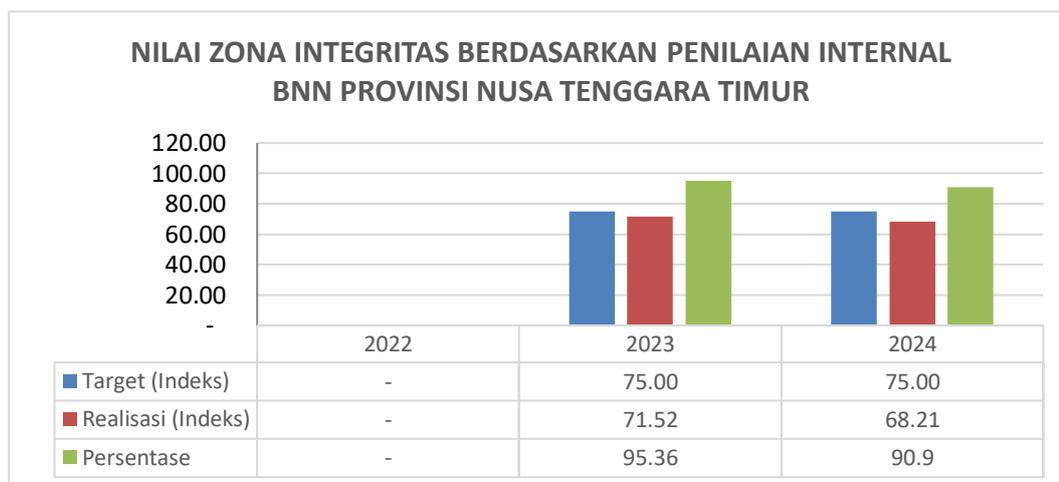
Adapun perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal Tahun 2024:

Perhitungan Capaian :

$$\% \text{ Capaian} : \frac{75 \text{ indeks}}{68.21 \text{ indeks}} \times 100\% = 90.9 \%$$

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tahun sebelumnya

Data perbandingan realisasi kinerja Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022, 2023 dan tahun 2024.



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi kinerja Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal dibawah dari target kinerja yang telah ditetapkan dengan nilai ZI 68.21 Indeks dari target nilai ZI 75 Indeks. Pada Tahun 2023 realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal dibawah dari target kinerja yang telah ditetapkan dengan nilai ZI

71.51 Indeks dari target nilai ZI 75 Indeks, sedangkan Tahun 2022 Indikator Kinerja Kegiatan Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal belum ditetapkan

c. Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas tidak sesuai dengan rencana pembangunan Zona Integritas yang sudah ditetapkan sehingga mempengaruhi nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal.

d. Rencana Aksi dan Strategi ke Depan

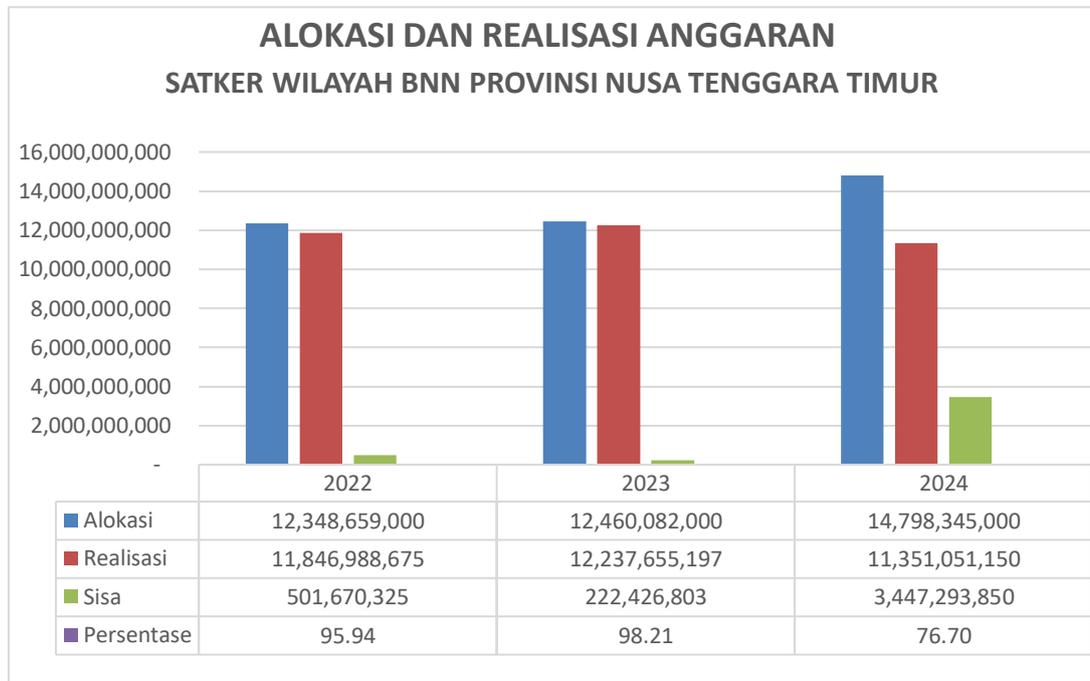
Dalam usaha meningkatkan Nilai zona integritas , maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan di awal tahun.
- 2) Meningkatkan komitmen setiap kelompok kerja untuk pemenuhan dokumen pada setiap area pembangunan zona integritas sesuai dengan rencana pembangunan Zona Integritas yang sudah ditetapkan Tahun 2025

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024 Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 14.798.345.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 11.351.051.150,- atau setara dengan 76.70 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.447.293.850,- atau setara dengan 23.30 % anggaran yang tidak terserap.

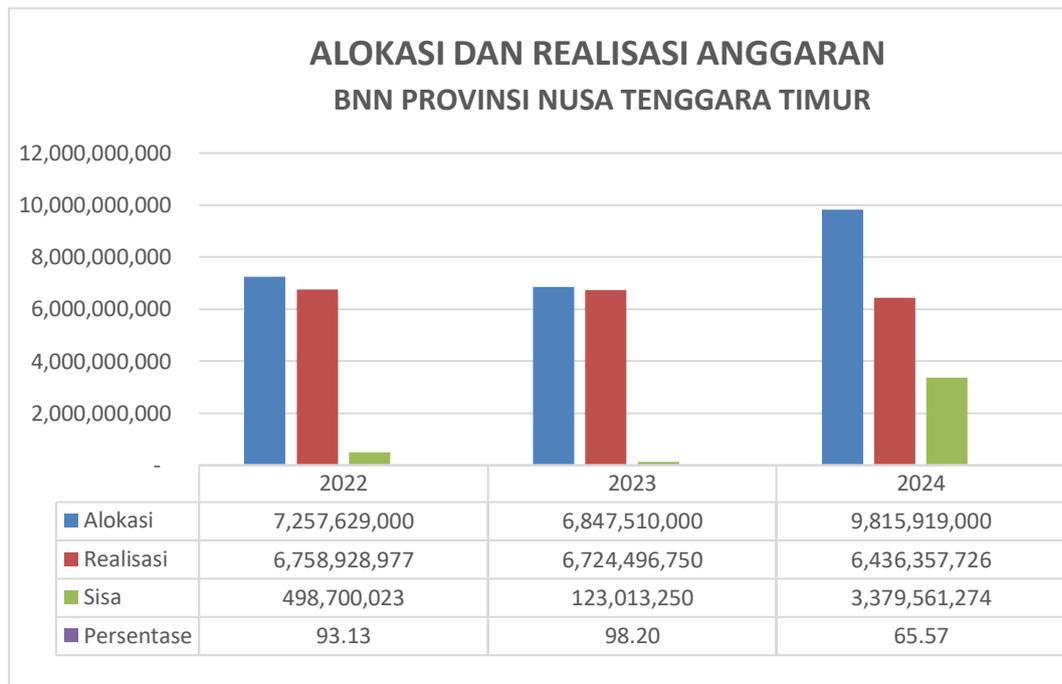
1. Data perbandingan realisasi anggaran Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jajaran tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran Satker Wilayah mencapai 76.70 persen menurun 21.51 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 menurun 19.24 persen. Hal ini disebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai target karena realisasi Belanja Pegawai pada Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak tercapai dari Pagu Anggaran Rp.6.483.762.000 realisasi Rp.3.161.629.239 atau 48.76% dari total anggaran, sisa Pagu Belanja Pegawai yang tidak terserap sebesar Rp.3.322.132.761 disebabkan karena ada kesalahan perencanaan pagu anggaran Belanja Pegawai. Hal ini sangat berkorelasi terhadap besaran persentase penyerapan anggaran pada Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Satker Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.

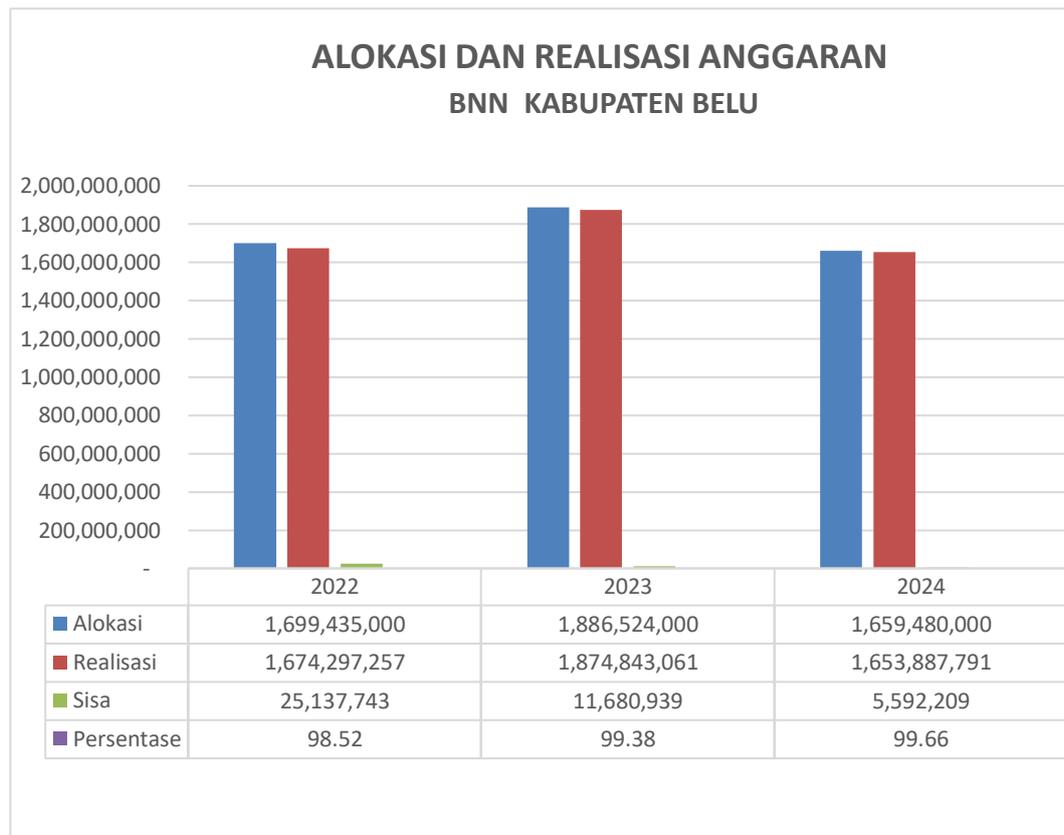
2. Data perbandingan realisasi anggaran per masing-masing Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur



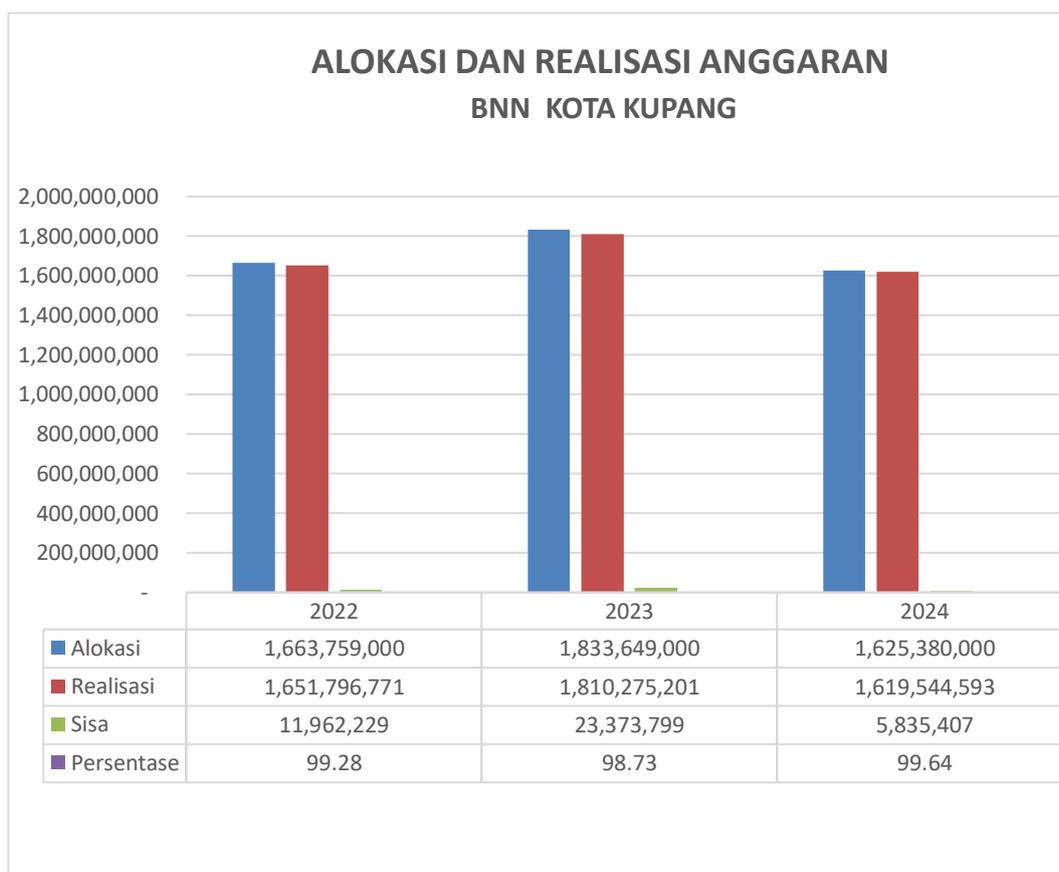
Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran mencapai 65.57 persen menurun sebesar - 32.63 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 menurun sebesar - 27.56 persen. Hal ini disebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai target karena realisasi Belanja Pegawai pada Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak tercapai dari Pagu Anggaran Rp.6.483.762.000 realisasi Rp.3.161.629.239 atau 48.76% dari total anggaran, sisa Pagu Belanja Pegawai yang tidak terserap sebesar Rp.3.322.132.761 disebabkan karena ada kesalahan perencanaan pagu anggaran Belanja Pegawai. Hal ini sangat berkorelasi terhadap besaran persentase penyerapan anggaran pada Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Satker Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.

2) BNN Kabupaten Belu



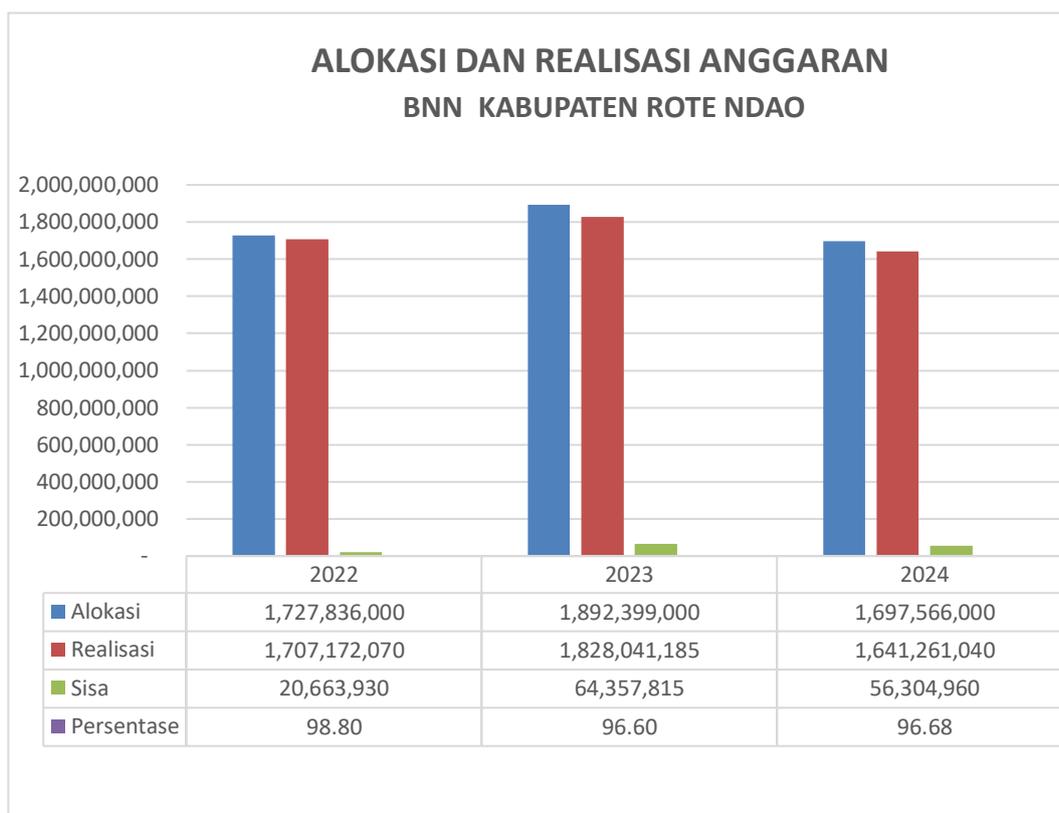
Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi anggaran BNN Kabupaten Belu tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran mencapai 99.66 persen meningkat sebesar 0.28 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dan meningkat sebesar 1.14 persen bila dibandingkan realisasi anggaran tahun 2022.

3) BNN Kota Kupang



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi anggaran BNN Kota Kupang tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran mencapai 99.64 persen meningkat sebesar 0.91 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dan meningkat 0.36 persen bila dibandingkan realisasi anggaran tahun 2022.

4) BNN Kabupaten Rote Ndao



Grafik di atas menggambarkan perbandingan realisasi anggaran BNN Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran mencapai 96.68 persen mengalami peningkatan sebesar 0.08 persen bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dan pada mengalami penurunan sebesar – 2.12 persen bila dibandingkan realisasi anggaran tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) menunjukkan sebagian besar indikator pada IKK telah tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, namun dengan segala keterbatasan yang ada telah dilakukan berbagai strategi dan upaya optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Realisasi anggaran Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mencapai Rp.11.351.051.150,- atau 76.70 % dari Pagu Anggaran 14.798.345.000,-, dengan sisa anggaran Rp. 3.447.293.850,- atau setara dengan 23.30% yang tidak terealisasi. Meskipun realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, namun sebagian besar sisa anggaran di Tahun 2024 sebagai bentuk efisiensi anggaran.

B. Saran dan Masukan

1. Penguatan Sumber Daya Manusia bagi semua pegawai Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan bagi personil dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja personil untuk mendukung capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan Koordinasidan peran aktif *stakeholder* dan masyarakat dalam program P4GN di daerah.

3. Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.
4. Akselerasi pembentukan kelembagaan BNNK di Provinsi Nusa Tenggara Timur di 19 (sembilan belas) Kabupaten.

Kupang, 22 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Totok Lisdiarto S, S.I.K., S.H., M.H.

LAMPIRAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI CAPAIAN TARGET DAN ANGGARAN
SATKER WILAYAH BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	3 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	66.7	P4GN	340.640.000	339.650.000	99.71
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100.00		433.750.000	429.650.000	99.05
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100.00		806.210.000	802.086.269	99.49
Meningkatkan upaya pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	87.18 %	128.2		33.105.000	20.795.000	62.82
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100.00		77.670.000	77.665.000	99.99
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitas narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100.00		507.758.000	481.338.500	94.80

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	8 Unit	8 Unit	100.00				
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.77 Indeks	3.77 Indeks	100.00				
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	3 berkas perkara	4 berkas perkara	133.00		249.400.000	240.794.641	96.55
						75.000.000	75.000.000	100.00
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100.00		92.825.000	70.086.000	75.50
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100 Indeks	100 Indeks	100.00				
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 Indeks	94.50 Indeks	106.2	Dukungan Manajemen	12.181.987.000	8.813.985.740	72.35
	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1 BNN Kabupaten / Kota	3 BNN Kabupaten / Kota	300.00				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	94.65 Indeks	89.56 Indeks	94.6				
	Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kab / Kota	2 BNN Kab / Kota	66.70				
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal	75 indeks	68.21 indeks	90.90				
Total						14.798.345.000	11.351.051.150	76.70

Pagu Anggaran : Rp. 14.798.345.000,-
Total Realisasi Pagu Anggaran : Rp. 11.351.051.150,-
Prosentase : 76.70 %

Kupang, 22 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Totok Lisdiarto S., S.I.K., S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIKI YANUARFI, S.H., M.Si
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.410.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.434.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.895.760.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.83.720.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.419.890.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.45.295.000
7. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.75.000.000
8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.250.000.000
9. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.103.117.000
10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.6.902.402.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.62.680.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.51.276.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.5.466.063.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolanan	Rp.50.000.000

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MARTHINUS HUKOM, S.I.K.,M.Si.

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	8 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan	100 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	narkotika	Kesehatan Tahanan	
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	1 Kabupaten/Kota
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,36 Indeks
15	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMMAD NASRUN M., S.H., M.H
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN BNNP NTT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIKI YANUARFI, S.H., M.Si
Jabatan : KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**


RIKI YANUARFI, S.H., M.Si


MOHAMMAD NASRUN M., S.H., M.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	3 Berkas Perkara
2	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
3	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks

1. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Rp. 75.000.000
2. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Rp. 250.000.000
3. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp. 103.117.000

Kupang, Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR



RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**



MOHAMMAD NASRUN M., S.H., M.H



**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt
Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM BNNP NTT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIKI YANUARFI, S.H., M.Si
Jabatan : KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN UMUM
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**

DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 Indeks
2	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	1 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,36 Indeks
4	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp. 6.902.402.000 |
| 2. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp. 62.680.000 |
| 3. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp. 51.276.000 |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp. 5.466.063.000 |
| 5. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp. 50.000.000 |

Kupang, Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR



RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN UMUM
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**



DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt



**PERJANJIAN KINERJA
KOORDINATOR BIDANG P2M BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSATENGGERA TIMUR TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LIA NOVIKA ULYA, S.KM

Jabatan : KOORDINATOR BIDANG P2M BNNP NTT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Jabatan : KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

**KOORDINATOR BIDANG P2M
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**

LIA NOVIKA ULYA, S.KM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOORDINATOR BIDANG P2M BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSATENGGAH TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp. 410.000.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp. 434.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp. 895.760.000 |

Kupang, Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

**KOORDINATOR BIDANG P2M
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**

LIA NOVIKA ULYA, S.KM



**PERJANJIAN KINERJA
KOORDINATOR BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. DAULAT ANTONI DAVID SAMOSIR

Jabatan : KOORDINATOR BIDANG REHABILITASI BNNP NTT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Jabatan : KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

**KOORDINAR BIDANG REHABILITASI
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**

dr. DAULAT ANTONI DAVID SAMOSIR

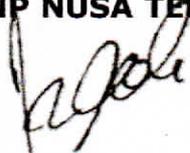
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOORDINATOR BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
3	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	8 Unit
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,77 Indeks

1. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp. 83.720.000
2. Kegiatan Penguatan Lembaga rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp. 419.890.000
3. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp. 45.295.000

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP NUSA TENGGARA TIMUR



RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Kupang, Maret 2024
Pihak Pertama,

**KOORDINAR BIDANG REHABILITASI
BNNP NUSA TENGGARA TIMUR**



dr. DAULAT ANTONI DAVID SAMOSIR



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELU
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. RIZAL, S. Sos
Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN BELU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIKI YANUARFI, SH, M.Si
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BNN KABUPATEN BELU

RIKI YANUARFI, SH, M.Si

MUH. RIZAL, S. Sos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELU**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	56,20 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85,625 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,48 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,06 %
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,65 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
2. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.215.586.000
3. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.705.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.26.880.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.99.946.000
6. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.77.000.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.92.072.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.360.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.604.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.104.858.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,

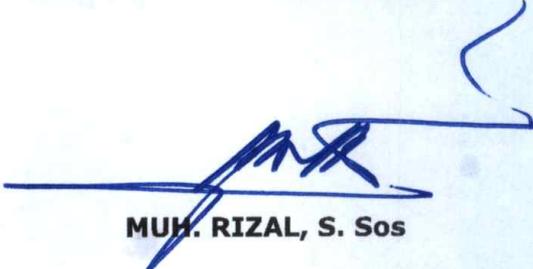
KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


RIKI YANUARFI, SH, M.Si

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KABUPATEN BELU


MUH. RIZAL, S. Sos



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt
Jabatan : PIt. KEPALA BNN KOTA KUPANG

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIKI YANUARFI, S.H., M.Si
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pihak Pertama,

PIt. KEPALA BNN KOTA KUPANG

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,65 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81,339 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,53 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	2,60 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,39 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
2. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.215.586.000
3. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.905.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.980.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.100.242.000
6. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.87.148.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.360.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.10.664.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.106.981.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



RIKI YANUARFI, S.H., M.Si

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

Pit. KEPALA BNN KOTA KUPANG



DOMINIKUS TUPEN SABON, S.Pt



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRIK LELIS, SH
Jabatan : PLT. KEPALA BNN KABUPATEN ROTE NDAO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIKI YANUARFI, S.H., M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

RIKI YANUARFI, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,

**PLT. KEPALA BNN KABUPATEN
ROTE NDAO**

HENDRIK LELIS, SH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ROTE NDAO**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	88,125 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,34 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77 %
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	80 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,33 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
2. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
3. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.545.000
4. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.215.586.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.980.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.97.055.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.92.652.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.360.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.12.854.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.080.737.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



RIKI YANUARFI, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,

**PLT. KEPALA BNN KABUPATEN
ROTE NDAO**



HENDRIK LELIS, SH

REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATKER KEWILAYAHAN FUNGSI P2M BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalagunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	s. BNNP NTT	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	66.7%	Persen	<p>1) Satu Kab/Kota yaitu BNNK Belu memiliki indeks ketahanan diri remaja berkategori Sangat Tinggi, satu BNN Kab/Kota memiliki indeks ketahanan diri remaja berkategori Tinggi yaitu BNNK Rote Ndao. Hal ini didukung beberapa faktor antara lain: 1). Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi yang terusun secara baik melalui pembuatan timeline; 2). Koordinasi yang baik antara BNNP NTT dan Jajaran dengan stakeholder terkait; 3). Partisipasi aktif stakeholder dalam mendukung program kerja BNNP NTT dan Jajaran; 4). Pelaksanaan sosialisasi kepada remaja sesuai dengan dimensi ketahanan diri remaja anti narkoba; 5). Pemahaman sasaran terhadap konsep ketahanan diri dalam mencegah penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba; 6). Metode sosialisasi cukup efektif meningkatkan pemahaman remaja terhadap pencegahan narkoba; 7). Ketepedulian lingkungan sekolah dalam upaya P4GN yang melibatkan para siswa; 8). Adanya satu Kabupaten yang memiliki indeks ketahanan diri remaja berkategori sangat rendah yaitu BNN Kota Kupang karena adanya pemotongan anggaran.</p>	<p>1) Kurangnya SDM Penyuluh Narkotika sebagai fasilitator di Kabupaten/Kota 2) Pangkalan kuisioner pada aplikasi Dektan tidak didampingi dan dipandu oleh Fasilitator, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman isi kuisioner dan kesalahan dalam penginputan.</p>	<p>Dalam usaha meningkatkan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut: 1) Menyebarkan informasi P4GN melalui berbagai metode dan media yang sesuai perkembangan jaman secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat. 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan media untuk mencapai outcome yang diharapkan 3) Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan KIE tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat seperti lomba-lomba kreatif yang melibatkan masyarakat. 4) Membuat terobosan yang inovatif dan masif dalam KIE P4GN seperti melalui Lembaga Pendidikan dengan mengintegrasikan materi Pendidikan anti narkoba kedalam kurikulum mata pelajaran. 5) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan di lingkup BNNP dan BNNK/Kota. 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. 7) Peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan.</p>	<p>1) Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui pelaksanaan lomba kreatif, seperti film, quotes, pantun, dan video singkat; 2) Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui konten kreatif di media sosial BNNP NTT Jajaran; 3) Kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti Kwarcab dan Kwarda dalam peningkatan KIE P4GN dengan Pelajar secara berkelanjutan; 4) Integrasi materi pendidikan anti narkoba di tingkat sekolah menengah</p>
	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba	b. BNN KAB BELU	56.20 Indeks	55.55 Indeks	98.8%	Persen	<p>Indeks ketahanan diri remaja berkategori Sangat Tinggi hal ini disebabkan karena :1. Terjalinnnya sinergitas yang baik antara BNNK Belu dengan Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, swasta dan berbagai insan media sehingga memudahkan penyebaran P4GN; 2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi yang terusun secara baik melalui pembuatan timeline.</p>	<p>Penyebaran kuisioner belum merata ke semua sekolah di Kabupaten Belu</p>	<p>1. Menyebarkan informasi P4GN melalui media sesuai perkembangan zaman secara efektif, efisien dan tepat sasaran 2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan insan media 3. Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan diseminasi informasi tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat.</p>	<p>1. Penyebarluasan Informasi Edukasi melalui konten media sosial; 2. Integrasi materi pendidikan anti narkoba di lingkungan sekolah</p>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba	c. BNN KOTA KUPANG	53.65 Indeks	40.98 Indeks	76.4%	Person	Indeks ketahanan diri remaja berkategori Sangat Rendah Hasil yang diperoleh dalam perhitungan lebih rendah dari target karena hal-hal sebagai berikut: Penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) telah mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi serta Kegiatan yang dihitung hanya yang didukung oleh DIPA pada setiap satuan kerja, sedangkan untuk kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan	Penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) telah mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi	Menghindari Automatic Adjustmen (AA) yang mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi secara keseluruhan dilaksanakan	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalagunaan narkoba	d. BNN KAB ROTE NDAO	52 Indeks	51.24 Indeks	98.5%	Persen	Indeks ketahanan diri remaja berkategori Tinggi hal ini disebabkan : 1).Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi yang tersusun secara baik melalui pembuatan timeline; 2).Sinergitas dan Kerjasama yang terjalin baik dengan lingkungan Pendidikan untuk mendukung terwujudnya ketahanan diri anti narkoba pada remaja; 3).Pelaksanaan sosialisasi kepada remaja sesuai dengan dimensi ketahanan diri remaja anti narkoba; 4). Metode sosialisasi cukup efektif meningkatkan pemahaman remaja terhadap pencegahan narkoba.	1). Kurang aktifnya peserta dalam menjalankan rencana aksi yang dilingkungkannya; 2). Tidak ada dukungan anggaran untuk melakukan kegiatan rencana aksi	1). Memperluas jaringan relasi BNN kota dengan Stakeholder; 2). Sosialisasi program P4GN bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkoba di Wilayah Kab. Rote Ndao; 3). Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program P4GN; 4). Membuat terobosan yang inovatif dan masif dalam KIE P4GN seperti melalui Lembaga Pendidikan dengan mengintegrasikan materi Pendidikan anti narkoba kedalam kurikulum mata pelajaran.	
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	a. BNNP NTT	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100.0%	Persen	Tiga Kabupaten/Kota memiliki indeks ketahanan keluarga berkategori tinggi, hal ini didukung beberapa faktor antara lain : 1) Pelaksanaan fasilitasi ketahanan keluarga anti narkoba di Kab/Kota sudah berjalan maksimal, didukung SDM yang sudah berkompoten sebagai fasilitator; 2) Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektera sudah sesuai dengan ketentuan; 3) Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga; 4) Konsistensi praktek peserta pasca fasilitasi sudah berjalan maksimal	1). Belum adanya pelatihan khusus bagi Fasilitator Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di tingkat Kabupaten/Kota; 2). Ketahanan keluarga belum menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait; 3). Keluarga peserta program belum konsisten dalam mengikuti waktu / timeline pelaksanaan kegiatan.	Dalam usaha meningkatkan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks ketahanan keluarga anti narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Nusa Tenggara Timur, maka rencana aksi dan strategi kedepan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kemampuan petugas/fasilitator melalui pelatihan/pembekalan/workshop. 2) Memilih peserta ketahanan keluarga lebih selektif lagi berdasarkan aspek responsif dan partisipasi aktif di lingkungan masyarakat, serta merupakan warga masyarakat yang menjadi tokoh/panutan di lingkungannya. 3) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga seperti PKK 4) Peningkatan pengawasan atau evaluasi dalam pelaksanaan ketahanan keluarga.	1) Bersinergi dan kolaborasi bersama dengan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dalam pelaksanaan Fasilitasi Ketahanan keluarga secara berkelanjutan 2) Pelatihan fasilitator pelaksana program ketahanan keluarga dengan melibatkan anggota TP PKK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkotika	b. BNN KAB BELU	85.625 Indeks	76.696 Indeks	89,6%	Persen	1) Pengisian kuesioner pada aplikasi Deklara sudah sesuai dengan ketentuan, 2) Partisipasi aktif keluarga dalam mengikuti pelaksanaan program ketahanan keluarga, 3)Terjalannya sinergitas antara BNNK Belu dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor lainnya dalam pelaksanaan intervensi yang dilakukan terhadap keluarga maupun desa sendiri sebagai lokus pelaksanaan kegiatan P4GN.	1. Ketahanan keluarga belum menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait, 2. Keluarga peserta program belum konsisten dalam penerapan di keluarga masing-masing	1. Meningkatkan kualitas intervensi P4GN terhadap keluarga dan desa serta memperkuat sinergitas yang telah terbangun bersama Pemda dan lintas sektor lainnya, 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang di lakukan 3. Mendorong PEMDA untuk membuat regulasi penganggaran kegiatan P4GN di lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan	Bersinergi dengan TP PKK Kabupaten dan Kecamatan dalam pelaksanaan fasilitas ketahanan keluarga
	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkotika	c. BNN KOTA KUPANG	81.339 Indeks	85.375 Indeks	105,0%	Persen	1). Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan advokasi Program ketahanan keluarga anti narkotika yang terasun secara baik melalui pembuatan timeline; 2) Koordinasi yang baik antara BNNK/Kota dengan Stakeholder serta seluruh Komponen masyarakat	1) Kurang aktifnya peserta dalam menjalankan rencana aksi dilingkungannya, 2) Tidak ada dukungan anggaran untuk melakukan kegiatan rencana aksi	1). Memperluas jaringan relasi BNN kota dengan Stakeholder; 2) Sosialisasi program P4GN bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkotika di Wilayah Kota Kupang	
	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalagunaan Narkotika	d. BNN KAB ROTE NDAO	88.125 Indeks	85.893 Indeks	97,5%	Persen	1). Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan advokasi Program ketahanan keluarga anti narkotika yang terasun secara baik melalui pembuatan timeline; 2) Koordinasi yang baik antara BNNK/Kota dengan Stakeholder serta seluruh Komponen masyarakat	Tidak ada dukungan anggaran untuk melakukan kegiatan rencana aksi	1). Memperluas jaringan relasi BNN kota dengan Stakeholder; 2). Sosialisasi program P4GN bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkotika di Wilayah Kab. Rote Ndao	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	a. BNNP NTT	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100.0%	Persen	Tiga Kabupaten/Kota memiliki indeks kemandirian partisipasi berkategori Sangat Mandiri, hal ini didukung beberapa faktor antara lain : 1). Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi yang tersusun secara baik melalui pembuatan timeline; 2). Koordinasi yang baik antara BNNP NTT dan Jaringan dengan stakeholder terkait. 3).Partisipasi aktif stakeholder dalam mendukung program kerja BNNP NTT dan Jaringan 4) Pelaksanaan sosialisasi kepada remaja sesuai dengan dimensi ketahanan diri remaja anti narkoba. 5) Pemahaman sasaran terhadap konsep ketahanan diri dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 6) Metoda sosialisasi cukup efektif meningkatkan pemahaman remaja terhadap pencegahan narkoba. 7) Keterpedulian lingkungan sekolah dalam upaya P4GN yang melibatkan pada siswa/i.	1) Kurangnya SDM Penyuluh Narkoba sebagai fasilitator di Kabupaten/Kota 2) Pengisian kuesioner pada aplikasi Deklari tidak didampingi dan dipandu oleh Fasilitator, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman isi kuesioner dan kesalahan dalam penginputan.	Dalam usaha meningkatkan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi, maka rencana aksi dan strategi ke depan adalah sebagai berikut : 1) Menyebarkan informasi P4GN melalui berbagai metode dan media yang sesuai perkembangan jaman secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat. 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder dan media untuk mencapai outcome yang diharapkan. 3) Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan KIE tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat seperti lomba-lomba kreatif yang melibatkan masyarakat. 4) Membuat terobosan yang inovatif dan masif dalam KIE P4GN seperti melalui Lembaga Pendidikan dengan mengintegrasikan materi Pendidikan anti narkoba kedalam kurikulum mata pelajaran. 5) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan di lingkup BNNP dan BNNK/Kota. 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. 7) Peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan	1). Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui pelaksanaan lomba kreatif, seperti film, quotes, pantun, dan video singkat; 2). Penyebarluasan informasi dan edukasi melalui konten kreatif di media sosial BNNP NTT Jaringan 3) Kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti Kwarcab dan Kwarcab dalam peningkatan KIE P4GN dengan Pelajar secara berkelanjutan. 4) Integrasi materi pendidikan anti narkoba di tingkat sekolah menengah
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	b. BNN KAB BELU	3.25 Indeks	3.49 Indeks	107.4%	Persen	Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Sangat Mandiri hal ini disebabkan : 1). Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan anti narkoba yang efektif dan efisien dan tepat sasaran; 2).Program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dilaksanakan sesuai dengan standar aktifitas dan timeline yang telah ditetapkan di awal tahun; 3).Hubungan dan kerja sama yang baik antara BNN Kota dengan Stakeholder/pemegang kebijakan; 4).Meningkatnya kesadaran dan	1. Partisipasi PEMDA dalam mendukung P4GN belum merata di setiap OPD dikarenakan keterbatasan anggaran; 2. Sebagian besar penggiat P4GN belum berpartisipasi aktif	Meningkatkan sinergitas dan mendorong instansi/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan P4GN di lingkungannya.	
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	c. BNN KOTA KUPANG	3.53 Indeks	3.54 Indeks	100.3%	Persen	Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Sangat Mandiri hal ini disebabkan : 1). Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan anti narkoba yang efektif dan efisien dan tepat sasaran; 2).Program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dilaksanakan sesuai dengan standar aktifitas dan timeline yang telah ditetapkan di awal tahun; 3).Hubungan dan kerja sama yang baik antara BNN Kota dengan Stakeholder/pemegang kebijakan; 4).Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya upaya P4GN di setiap Komponen masyarakat	1). Kurang aktifnya peserta dalam menjalankan rencana aksi dilingkungannya; 2) Tidak ada dukungan anggaran untuk melakukan kegiatan rencana aksi	Meningkatkan sinergitas dan mendorong instansi/lembaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan P4GN di lingkungannya.	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	d. BNN KAB ROTE NDAO	3.34 Indeks	3.37 Indeks	100.9%	Persen	Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori Sangat Mandiri hal ini disebabkan : 1). Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan anti narkoba yang efektif dan efisien dan tepat sasaran; 2).Program pemberdayaan masyarakat anti narkoba dilaksanakan sesuai dengan standar aktifitas dan timeline yang telah ditetapkan di awal tahun; 3).Hubungan dan kerja sama yang baik antara BNN Kota dengan Stakeholder/pemegang kebijakan; 4).Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya upaya P4GN di setiap Komponen masyarakat	1). Kurang aktifnya peserta dalam menjalankan rencana aksi dilingkungannya; 2). Tidak ada dukungan anggaran untuk melakukan kegiatan rencana aksi	Meningkatkan sinergitas dan mendorong instansi/embaga dan penggiat yang telah dibentuk untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan P4GN di lingkungannya.	

Kupang, 13 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Totok Lisdiarto S.S.K., S.H., M.H.

REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATKER KEWILAYAHAN FUNGSI REHABILITASI BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	a. BNNP NTT	68 %	87.18 %	128.2%	Persen	1).Perencanaan dan Pelaksanaan Terhadap Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika di Klinik BNNP serta Stakeholder terkait yang ada di masyarakat yaitu IBM telah terlaksana dengan baik. 2) target untuk klien tercapai	-	Penyebaran Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Sosialisasi program rehabilitasi rawat jalan dan program IBM kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan pencegahan dan penyebaran informasi narkotika di Wilayah Kabupaten dan kota agar masyarakat sadar untuk mendapatkan layanan rehabilitasi	-
	Meningkatnya upaya pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	b. BNNK BELU	68 %	100 %	147.1%	Persen	1) Klien yang ditangani Klinik Pratama BNN Kabupaten Belu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Komitmen yang tinggi dari klien untuk mengikuti layanan rehabilitasi sampai selesai dan mengalami peningkatan kualitas hidup	-	Memberikan Ketrampilan kepada Penyalahguna atau Pecandu agar kualitas hidup lebih baik.	-
	Meningkatnya upaya pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	c. BNN KOTA KUPANG	68 %	100 %	147.1%	Persen	1) Klien yang ditangani Klinik Pratama BNN Kabupaten Kota Kupang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Komitmen yang tinggi dari klien untuk mengikuti layanan rehabilitasi sampai selesai dan mengalami peningkatan kualitas hidup	-	Memantau klien rehabilitasi melalui orang tua/pasangan/ orang terdekatnya agar dapat dikondisikan mengikuti program rehabilitasi hingga tuntas.	-
	Meningkatnya upaya pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	d. BNNK ROTE NDAO	68 %	100 %	147.1%	Persen	1) Klien yang ditangani Klinik Pratama BNN Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Komitmen yang tinggi dari klien untuk mengikuti layanan rehabilitasi sampai selesai dan mengalami peningkatan kualitas hidup	-	1) Petugas Rehabilitasi BNN Kabupaten Rote Ndao meningkatkan sosialisasi tentang program Rehabilitasi kepada Penyalahguna atau pecandu yang melaksanakan program rehabilitasi di klinik pratama BNN Kabupaten Rote Ndao. 2) Adanya peningkatan kemampuan kepada petugas dalam rangka pengisian instrumen WHOQoL (World Health Organization Quality of Life)-BREF 3) Memotivasi klien agar mengikuti layanan Rehabilitasi hingga selesai dan Memantau Perkembangan klien dalam mengikuti program layanan Rehabilitasi	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	a. BNNP NTT	10 Orang	10 Orang	100%	Persen	1). Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Baik terhadap Petugas BNNP dan BNNK Jajaran telah mendapatkan Pembekalan yang Kompeten oleh Direktorat PLRIP dan PLRKM sehingga pelaksanaan kemampuan kepada Petugas IBM dapat terlaksana dengan baik.		Adanya Pelatihan secara berkala kepada petugas IBM tentang layanan rehabilitasi rawat jalan secara Minimalis oleh BNNP dan BNNK	Tersedianya Sarana berupa materi/modul Pelatihan bagi Petugas AP pada Layanan IBM
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	b. BNNK BELU	10 Orang	10 Orang	100%	Persen	Petugas IBM sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.	Tidak semua Petugas IBM memahami program Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Tersedianya Sarana berupa materi/modul Pelatihan bagi Petugas IBM/ Agen Pemulihan pada Layanan IBM	
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	c. BNN KOTA KUPANG	10 Orang	10 Orang	100%	Persen	Petugas IBM sudah mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan penanganan pecandu dan penyalahguna narkoba.	Tidak semua petugas IBM memahami program layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).	Adanya asistensi secara berkala kepada petugas IBM/Agen Pemulihn tentang layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	
	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	d. BNNK ROTE NDAO	10 Orang	10 Orang	100%	Persen	1) Agen Pemulihan/Petugas layanan IBM sudah mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). 2) Agen Pemulihan/Petugas Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). 3) Agen Pemulihan/Petugas Layanan IBM sudah melaksanakan tata kelola pelaksanaan kegiatan IBM secara optimal serta aktif dalam kegiatan IBM		1) Masih ada Agen Pemulihan/Petugas Layanan IBM yang belum menangani klien narkotika di wilayah unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) karena adanya stigma terhadap penyalahguna narkotika. 2) Agen Pemulihan belum melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing	peningkatan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung program Rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkotika. 3) Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk tata kelola pelaksanaan kegiatan IBM dengan mengoptimalkan berbagai metode secara berkala kepada kepala desa dan BNN Kabupaten Rote Ndao sebagai pendamping IBM.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	a. BNNP NTT	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	Persen	1) Kerjasama yang terjalin dengan baik dengan stakeholder turut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna. 2) Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkotika. 3) Komitmen yang tinggi dari para penyelenggara program rehabilitasi milik instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat untuk Pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan sesuai Modul dan juknis layanan rehabilitasi yang sesuai SNI		1) Pemetaan kembali lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitas) agar operasional. 2) Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkotika. 3) Koordinasi dengan pembina teknis untuk meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional yang ada di wilayah NTT	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	b. BNNK BELU	1 Lembaga	1 Lembaga	100.0%	Persen	1) Adanya Kerjasama yang baik antara BNNK Belu dengan stakeholder dan Pemegang Kebijakan di Wilayah Kabupaten Belu turut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna. 2) Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkotika. 3) Komitmen yang tinggi dari para penyelenggara program rehabilitasi milik instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat. 4) Klien yang melaporkan diri secara sukarela masih kurang.		1) Pemetaan kembali lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan agar operasional. 2) Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkotika. 3) Koordinasi dengan pembina teknis untuk meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional. 4) Sosialisasi program Rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkotika di wilayah Kabupaten Belu. 5) Penyebarluasan informasi mengenai tempat layanan Rehabilitasi serta program layanan rehabilitasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Belu	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	c. BNN KOTA KUPANG	1 Lembaga	1 Lembaga	100.0%	Persen	1). Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu Penyalahguna Narkotika; 2). Kerjasama yang baik antara BNN Kota Kupang dengan stakeholder dan lembaga rehabilitasi di wilayah Kota Kupang; 3). Komitmen yang tinggi dari para penyelenggara program rehabilitasi milik instansi pemerintah dan Komponen Masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut melakukan rencana aksi berupa pemasangan spanduk bertuliskan melayani rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta memberikan KIE tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di setiap kegiatan yang ada di lingkungannya; 4). Klien yang melaporkan diri secara sukarela baik di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat masih kurang	1). Kurangnya kesadaran klien melaporkan diri untuk mendapatkan layanan rehabilitasi di fasilitas instansi pemerintah atau komponen masyarakat; 2). Sosialisasi program rehabilitasi yang belum maksimal; 3). Masih adanya stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkotika (jika melapor akan di penjara)	1). Pemetaan kembali lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan Komponen masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) agar operasional; 2). Sosialisasi program rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran narkotika di Wilayah Kota Kupang; 3). Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkotika	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	d. BNNK ROTE NDAO	1 Lembaga	1 Lembaga	100.0%	Persen	1) Tenaga Rehabilitasi sudah mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan Penanganan Pecandu Penyalahguna Narkotika. 2) Kerjasama yang baik antara BNNK Rote Ndao dengan stakeholder dan pengambil keputusan kebijakan di wilayah Kabupaten Rote Ndao. 3) Komitmen yang tinggi dari para stakholder penyelenggara Rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat.	1) Klien yang melaporkan diri secara sukarela baik di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat masih kurang.	1). Pemetaan kembali lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat yang akan diberi peningkatan kemampuan (mendapatkan penguatan, dorongan dan fasilitasi) agar operasional; 2). Sosialisasi program Rehabilitasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan Penyebaran narkotika di Wilayah Kabupaten Rote Ndao. 3). Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung program Rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkotika; 4). Koordinasi dengan Pembina Teknis untuk meningkatkan fasilitas lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan komponen masyarakat yang operasional; 5). Penyebarluasan informasi mengenai tempat layanan rehabilitasi serta Program Layanan Rehabilitasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Rote Ndao.	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	a. BNNP NTT	8 Unit	8 Unit	100.0%	Persen	Informasi mengenai layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Provinsi NTT dan BNNK Jajaran sudah di respon dengan baik oleh masyarakat melalui Tenaga Rehabilitasi atau Petugas IBM yang sudah mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penanganan Pecandu penyalahguna Narkoba.	-	Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTT dan BNNK jajaran dengan cara secara aktif masyarakat melakukan sosialisasi dan layanan IBM di lokasi desa dan kelurahan	-
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	b. BNNK BELU	2 Unit	2 Unit	100.0%	Persen	1) Adanya kerja sama yang baik antara BNNK Belu dengan stakeholder ikut mendukung program Rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba di Desa Napan dan Kelurahan Beirafu. 2) Kepala Desa Napan dan Lurah Beirafu serta jajaran ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Napan dan Kelurahan Beirafu.	-	1) Pemetaan kembali wilayah desa yang akan dibentuk sebagai Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan diberi penguatan agar operasional; 2) Agen pemulihan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan melaksanakan program Rehabilitasi kepada masyarakat; 3) Melibatkan semua unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Napan dan Kelurahan Beirafu untuk menjadi Agen Pemulihan IBM.	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	c. BNN KOTA KUPANG	2 Unit	2 Unit	100.0%	Persen	1). Adanya Kerjasama yang baik antara BNN Kota Kupang dengan stakeholder ikut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba di Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Pasir Panjang; 2) Lurah dan jajaran serta agen pemulihan berperan aktif dalam pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Pasir Panjang; 3). Anggota Tim Agen Pemulihan (AP) sudah mencakup semua unsur di masyarakat (baik dari RT, RW, Karang Taruna, Tokoh Pemuda dan Ibu PKK).	1) Tim Agen Pemulihan belum bekerja secara maksimal, 2) belum ada klien yang ditangani oleh Tim Agen pemulihan, 3) Tidak adanya anggaran pada Kelurahan yang dapat menunjang pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Pasir Panjang.	1) Pemetaan kembali wilayah Kelurahan yang akan di bentuk sebagai unit intervensi berbasis masyarakat dan diberi penguatan agar operasional; 2) Agen Pemulihan Lebih aktif dalam Mensosialisasikan dan melaksanakan program Rehabilitasi kepada masyarakat, 3). Mengadvokasi kepada Lurah dan jajaran untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program IBM di Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Pasir Panjang.	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DLAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	d. BNNK ROTE NDAO	2 Unit	2 Unit	100.0%	Persen	1) Adanya kerjasama yang baik antara BNN Kabupaten Rote Ndao dengan stakeholder ikut mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkotika di Desa Boa dan Desa Sedoeen. 2) Kepala Desa dan jajaran serta Agen Pemulihan berperan aktif dalam pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Boa dan Desa Sedoeen.	1) Keterbatasan anggaran pada Desa Boa dan Desa Sedoeen yang bekerjasama dengan BNN BNN Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Boa dan Desa Sedoeen.	1) Pemetaan kembali Wilayah Desa yang akan dibentuk sebagai unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan diberikan penguatan agar operasional. 2) Agen Pemulihan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan melaksanakan program rehabilitasi kepada masyarakat. 3) Melibatkan semua unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Boa dan Desa Sedoeen untuk menjadi anggota IBM. 4) Memberikan advokasi kepada kepala Desa Boa dan Desa Sedoeen dan jajarannya untuk mengalokasikan pendanaan mandiri dalam rangka pelaksanaan program IBM di Desa Boa dan Desa Sedoeen untuk keberlanjutan dan pengembangan program IBM.	
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitas BNN	a. BNNP NTT	3.77 Indeks	3.77 Indeks	100.0%	Persen	Faktor keberhasilan adalah klinik BNNP dan BNNK jajaran yang telah dinilai sudah memenuhi standar penilaian melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus.		Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan/bimtek dan dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana layanan lembaga rehabilitasi.	
	Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitas BNN	b. BNNK BELU	3.06 Indeks	3.8 Indeks	124.2%	Persen	Faktor keberhasilan adalah klinik BNNP dan BNNK jajaran yang telah dinilai sudah memenuhi standar penilaian melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus.		1) Petugas Rehabilitasi BNNK Belu meningkatkan sosialisasi tentang program rehabilitasi kepada masyarakat 2) Memotivasi klien agar mengikuti layanan rehabilitasi hingga selesai. 3) Memantau Perkembangan klien dalam mengikuti program layanan Rehabilitasi. 4) Melakukan penjangkauan kepada individu beresiko (Pekerja Migran).	
	Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitas BNN	c. BNN KOTA KUPANG	2.60 Indeks	3.55 Indeks	136.5%	Persen	Faktor keberhasilan adalah klinik BNNP dan BNNK jajaran yang telah dinilai sudah memenuhi standar penilaian melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus.	Klien kurang aktif mengikuti program layanan rehabilitasi	1) Klien di harapkan berperan aktif dalam menyelesaikan program rehabilitasi. 2) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Layanan Rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kota Kupang	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitas BNN	d. BNNK ROTE NDAO	3.77 Indeks	3.91 Indeks	103.7%	Persen	Faktor keberhasilan adalah klinik BNNP dan BNNK jajaran yang telah dinilai sudah memenuhi standar penilaian melalui penilaian identitas dan data demografi lembaga, komponen penilaian umum dan komponen penilaian khusus.	1) Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai layanan Rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Rote Ndao 2) Sarana dan prasarana yang belum representatif untuk layanan dan SDM yang masih kurang	1) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan Rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Rote Ndao. 2) Melakukan pemetaan dan perencanaan pengajuan SDM dan sarana serta prasarana yang memadai untuk Klinik Pratama BNN Kabupaten Rote Ndao	

Kupang, 13 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Totok Lisdiarto S, S.I.K., S.H., M.H.

REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATKER KEWILAYAHAN BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET		REALISASI		%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
				3	Berkas Perkara	4	Berkas Perkara						
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	a. BNNP NTT	3	Berkas Perkara	4	Berkas Perkara	133%	Persen	Perubahan Manajemen sistem pengawasan dimana sistem pengawasan untuk tahun 2024 tidak semata-mata diberikan kepada anggota di lapangan/mengawasinya sendiri, namun ada perwira yang selalu mengawasi setiap kegiatan di lapangan.	Letak Geografis wilayah NTT merupakan daeran kepulauan sehingga untuk mendapatkan kepastian terhadap suatu target (TO) membutuhkan waktu beberapa hari dan anggaran yang memadai untuk sampai di daerah atau TKP tersebut.	Harus adanya peningkatan sarana prasarana dan perlengkapan yang mendukung kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika, khususnya ketika peredaran gelap narkotika yang terjadi di laut.	
			b. BNNK BELU	-	-	-	-	-	-				
			c. BNN KOTA KUPANG	-	-	-	-	-	-	-			
			d. BNNK ROTE NDAO	-	-	-	-	-	-	-			
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	a. BNNP NTT	100	Indeks	100	Indeks	100%	Persen	1.) Adanya pembagian tugas yang merata berupa piket jaga tahanan untuk semua anggota personil BNNP dan BNNK NTT untuk menjaga tahanan; 2.) Kekompakan, kebersamaan dan semangat kerja yang tinggi semua personil dalam menjaga dan mengawasi tahanan; 3.) Adanya kedisiplinan dari tahanan untuk mau mentaati semua peraturan di rutan BNNP NTT tersebut; 4.) Adanya olah raga rutin setiap pagi bagi para tahanan dan adanya pengecekan kesehatan tahanan secara rutin; 5.) Adanya pemberian dukungan vitamin bagi para tahanan.	1. Belum adanya sarana prasarana berupa mobil tahanan kantor; dan 2) Belum adanya kasi wasatehti sebagai pengendali semua kegiatan wasatehti.	Pengadaan sarana prasarana, dan perlengkapan guna mendukung semua kegiatan pelaksanaan pengawasan tahanan dan Peningkatan kemampuan personil dalam pengawasan tahanan melalui pembinaan, Pendidikan dan latihan khusus pengawasan tahanan	Tahanan diwajibkan ikut bimbingan rohani dan mental
			b. BNNK BELU	-	-	-	-	-	-	-			
			c. BNN KOTA KUPANG	-	-	-	-	-	-	-			
			d. BNNK ROTE NDAO	-	-	-	-	-	-	-			

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET	REALISASI	%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
11	Meningkatnya pengawasan fahaman dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, barang bukti narkotika dan non narkotika	a. BNNP NTT	100 Indeks	100 Indeks	100%	Persen	1). Adanya upaya pribadi dari anggota untuk keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika; 2). Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap pihak instansi-instansi yang menangani pemeriksaan lab terhadap barang bukti narkotika dan non narkotika, agar keamanan terhadap barang bukti tetap terjaga dan terjamin.	1). belum ada tempat penyimpanan khusus barang bukti narkotika dan non narkotika; 2). belum ada neraca (alat timbang) barang bukti narkotika dan non narkotika; 3). Tidak ada petugas khusus yang menangani barang bukti baik itu barang bukti narkotika maupun non narkotika	1). Pengadaan tempat khusus penyimpanan BB narkotika dan non narkotika; 2). Pengadaan neraca (alat timbang) BB narkotika dan non narkotika; 3). Harus ada petugas khusus yang mengurus dan mengamankan BB, baik itu narkotika maupun non narkotika.	
			b. BNNK BELU	- -	- -	- -	- -				
			c. BNN KOTA KUPANG	- -	- -	- -	- -				
			d. BNNK ROTE NDAO	- -	- -	- -	- -				

Kupang, 13 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Totok Lisdiarto S, S.I.K., S.H., M.H.

REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATKER KEWILAYAHAN BAGIAN UMUM BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPLIASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET		REALISASI		%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	a. BNNP NTT	89	Indeks	94.50	Indeks	106.2%	Persen	Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik	-	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-
	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	b. BNNK BELU	87	Indeks	99.95	Indeks	114.9%	Persen	Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik	-	Perlu adanya pemahaman bersama dan komitmen yang kuat dalam melaksanakan indikator nilai kinerja.	-
	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	c. BNN KOTA KUPANG	87	Indeks	98.98	Indeks	113.8%	Persen	Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik	-	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET		REALISASI		%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	d. BNNK ROTE NDAO	80	Indeks	94.57	Indeks	118.21	Persen	Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik	-	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-
13	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	a. BNNP NTT	1	Kab/ Kota	3	Kab/ Kota	300.0%	Persen	Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran BNNK Jajaran sudah dilaksanakan dengan baik	-	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-
14	Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	a. BNNP NTT	94.65	Indeks	89.58	Indeks	94.6%	Persen	Perencanaan anggaran belanja pegawai melebihi pagu anggaran belanja pegawai sehingga realisasi anggaran tidak tercapai menyebabkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak mencapai target	Perencanaan Anggaran terutama pada belanja pegawai tidak direncanakan sesuai pagu anggaran belanja pegawai sehingga menyebabkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak mencapai target dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran (nilai penyerapan anggaran tidak mencapai target)	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET		REALISASI		%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
	Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	b. BNNK BELU	95	Indeks	99.90	Indeks	105.5%	Persen	Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik	-	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-
	Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	c. BNN KOTA KUPANG	97.39	Indeks	97.98	Indeks	100.6%	Persen	Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sudah dilaksanakan dengan baik	-	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-
	Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	d. BNN KAB ROTE NDAO	97.33	Indeks	92.88	Indeks	95.4%	Persen	Kualitas perencanaan anggaran khususnya nilai deviasi hal III dipa tidak mencapai target dan Kualitas pelaksanaan anggaran pada belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan tidak mencapai target sehingga mempengaruhi nilai IKPA tidak mencapai target	realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada hal III dipa dan pelaksanaan belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KOMPILASI CAPAIAN WILAYAH	TARGET		REALISASI		%	SATUAN	FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2024
				3	Kab/Kot	2	Kab/ Kota						
15	Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	a. BNNP NTT	3	Kab/Kot	2	Kab/ Kota	66.7%	Persen	BNNK Rote Ndao Nilai IKPA tidak mencapai target disebabkan Kualitas perencanaan anggaran khususnya nilai deviasi hal III dipa tidak mencapai target dan Kualitas pelaksanaan anggaran pada belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan tidak mencapai target sehingga mempengaruhi target IKPA wilayah provinsi	realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana pada hal III dipa dan pelaksanaan belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	1) Merencanakan program/kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan terukur dalam pencapaian outcome yang diharapkan; 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi masing-masing bidang /pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang telah ditetapkan; 3) Konsistensi rencana penarikan dana awal dan rencana penarikan dana akhir menjadi perhatian untuk Tahun mendatang.	-
16	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	a. BNNP NTT	75	Indeks	68.21	Indeks	90.9%	Persen	belum adanya dukungan Aparatur BNNP NTT secara efektif melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Pemenuhan dokumen pembangunan Zona Intagentas tidak sesuai dengan rencana pembangunan Zona Integritas yang sudah ditetapkan sehingga mempengaruhi penilaian Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	Meningkatkan komitmen setiap kelompok kerja untuk pemenuhan dokumen pada setiap area pembangunan zona integritas sesuai dengan rencana pembangunan Zona Integritas yang sudah ditetapkan Tahun 2025	-

Kupang, 16 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Totok Lisdiarto S, S.I.K., S.H., M.H.

